



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



Aset Negara Kuat, Wujudkan Kemaslahatan Masyarakat

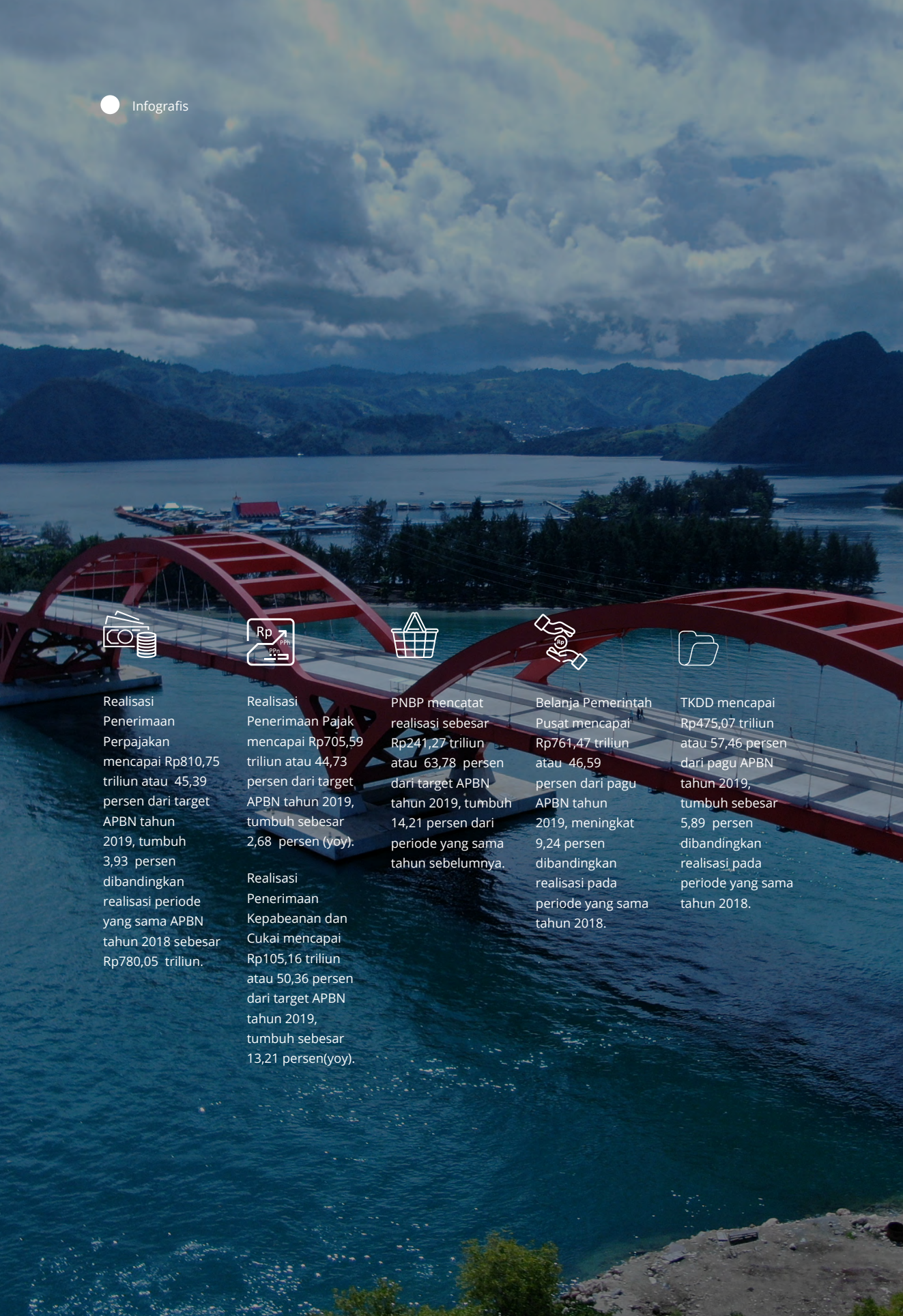
Scan untuk Unduh





“Pemerintah mendukung pendanaan terkait pendidikan melalui investasi pemerintah, seperti Dana Abadi Pendidikan, Dana Abadi Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung inovasi, Dana Abadi Universitas, dan Dana Abadi Kebudayaan”

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati



Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp810,75 triliun atau 45,39 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 3,93 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp780,05 triliun.



Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp705,59 triliun atau 44,73 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 2,68 persen (yoy).

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp105,16 triliun atau 50,36 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 13,21 persen(yoy).



PNBP mencatat realisasi sebesar Rp241,27 triliun atau 63,78 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 14,21 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.



Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp761,47 triliun atau 46,59 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 9,24 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.



TKDD mencapai Rp475,07 triliun atau 57,46 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 5,89 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Indonesia pada Triwulan II tahun 2019 tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy) didorong oleh kuatnya konsumsi dan kebijakan *countercyclical* belanja Pemerintah.

Sehingga, sepanjang Semester I 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,06 persen (yoy). Kondisi ekonomi global masih memberikan tekanan yang berdampak pada perlambatan investasi dan pertumbuhan negatif perdagangan internasional. Sementara itu, persentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen menurun dibandingkan 9,82 persen pada September 2018. Stabilitas ekonomi juga tetap terjaga dengan laju inflasi dan nilai tukar rupiah yang terkendali. Kondisi ini akan mampu menjaga daya beli

masyarakat. Selanjutnya, perbaikan kinerja transaksi berjalan akan terus dilakukan, terutama melalui peningkatan daya saing untuk memperkuat ekspor yang akan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Memasuki awal Triwulan III tahun 2019, kinerja realisasi pendapatan negara dan hibah secara umum masih menunjukkan hasil yang positif. Hingga akhir bulan Juli 2019, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp1.052,83 triliun atau 48,63 persen terhadap target APBN 2019. Capaian tersebut tercatat masih mampu tumbuh positif sebesar 5,88 persen (yoy). Realisasi penerimaan pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp810,75 triliun, PNPB sebesar

Rp241,27 triliun, dan hibah sebesar Rp805,40 miliar atau masing-masing telah mencapai 45,39 persen, 63,78 persen, dan 185,02 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Berdasarkan pertumbuhannya, penerimaan perpajakan mampu tumbuh positif sebesar 3,94 persen (yoy), PNBPN tumbuh positif sebesar 14,33 persen (yoy), sedangkan untuk penerimaan hibah masih tumbuh negatif 75,37 persen (yoy).

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Juli 2019 telah mencapai Rp705,59 triliun atau 44,73 persen dari target APBN 2019 dan tumbuh positif sebesar 2,68 persen (yoy), meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan. Faktor pertumbuhan restitusi dan dinamika eksternal, seperti penurunan aktivitas impor dan harga komoditas dunia ditengarai sebagai penyebab tekanan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak utamanya ditopang oleh penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPNBM). Secara lebih detail, realisasi PPh Nonmigas didominasi oleh penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, PPh Final, dan PPh Pasal 22 Impor. Sementara itu, realisasi penerimaan PPN dan PPNBM utamanya didominasi oleh penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) dan PPN Impor. Jika dicermati dari sisi pertumbuhannya, penerimaan pajak yang masih mampu tumbuh positif didorong oleh pertumbuhan signifikan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 1.215,31

persen (yoy) serta PPh Nonmigas yang masih tumbuh positif sebesar 5,27 persen (yoy). **Kontributor utama pertumbuhan PPh Nonmigas berasal dari pertumbuhan penerimaan PPh 21 dan PPh 25/29 Orang Pribadi (OP), masing-masing tercatat tumbuh sebesar 12,31 persen (yoy) dan 15,90 persen (yoy).** Kinerja pertumbuhan komponen PPh 21 dipengaruhi oleh faktor kinerja utilisasi tenaga kerja pada sektor usaha Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, dan Pertambangan. Sedangkan pertumbuhan PPh OP masih dipengaruhi dampak pasca *Tax Amnesty* berupa pertumbuhan angsuran bulanan dan kurang bayar SPT tahunan 2019. Secara sektoral, sektor Transportasi dan Pergudangan, serta Jasa Keuangan dan Asuransi masih menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan pajak secara umum. **Sementara itu, realisasi penerimaan PPN dan PPNBM mengalami pertumbuhan negatif 4,55 persen (yoy).** Komponen penerimaan PPN DN dan PPN Impor tumbuh negatif masing-masing sebesar 4,68 persen (yoy) dan 4,52 persen (yoy). Pertumbuhan negatif PPN DN merupakan dampak langsung dari kemudahan restitusi dipercepat pada tahun 2019. Lebih lanjut, tekanan terhadap PPN DN juga ditunjukkan oleh melemahnya PMI (*Purchasing Managers Index*) Manufaktur pada bulan Juli. Sedangkan PPN Impor juga mengalami pertumbuhan negatif yang dipengaruhi oleh tren penurunan aktivitas impor Indonesia. **Di sisi lain, realisasi penerimaan PPh Migas telah mencapai Rp35,50 triliun atau 53,66 persen dari target pada**

APBN 2019, akan tetapi mengalami pertumbuhan negatif 1,84 persen (yoy). PPh Migas yang tumbuh negatif diperkirakan dipengaruhi oleh adanya moderasi harga komoditas di pasar global, dimana indeks harga komoditas menunjukkan tren perlambatan khususnya produk energi yang berdampak langsung *commodity-based industry*.

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaannya telah mencapai Rp105,16 triliun atau 50,36 persen dari target APBN 2019, serta mampu tumbuh sebesar 13,22 persen (yoy). Komponen penerimaan cukai merupakan penopang utama dari total realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Lebih dalam, jika dilihat dari sisi pertumbuhannya penerimaan cukai tumbuh didorong utamanya oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang tumbuh masing-masing sebesar 22,51 persen (yoy) dan 18,45 persen (yoy). Faktor pendorong pertumbuhan penerimaan CHT yaitu jumlah produksi hasil tembakau (HT) bulan Juli tahun 2019 yang masih tumbuh dibanding pada Juli 2018, serta tarif tertimbang efektif yang hanya turun tipis dibandingkan dengan tarif awal tahun 2019. Selain itu, dampak pergeseran pelunasan pita cukai HT masih menjadi pendorong pertumbuhan penerimaan cukai sejak awal tahun 2019. Penerimaan bea masuk (BM) telah terealisasi sebesar Rp20,69 triliun atau 53,18 persen dari target APBN 2019. Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, penerimaan BM tumbuh negatif 3,42

persen (yoy). Hal ini diperkirakan terjadi akibat penurunan kinerja impor pada hampir semua jenis lapangan usaha, utamanya sektor Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan. Berdasarkan komoditasnya, penurunan BM utamanya dikontribusikan oleh turunnya impor komoditas Bensin, Minyak Bumi, Beras, serta Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Lebih lanjut, realisasi penerimaan bea keluar (BK) telah mencapai Rp1,85 triliun atau 41,83 persen dari target APBN 2019. Pertumbuhan penerimaan BK mengalami pertumbuhan negatif 52,72 persen (yoy). Penerimaan BK yang masih tumbuh negatif diperkirakan terjadi akibat turunnya kinerja ekspor pada seluruh sektor usaha, kecuali sektor usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang masih mampu sedikit mengalami kenaikan. Berdasarkan jenis komoditas, kinerja ekspor komoditas konsentrat tembaga menjadi kontributor utama penurunan pertumbuhan penerimaan BK.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada awal Triwulan III 2019 terus mengalami peningkatan. Sampai bulan Juli 2019, realisasi PNBP telah mencapai Rp241,27 triliun atau 63,78 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PNBP pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp211,26 triliun. Peningkatan ini utamanya didorong oleh kenaikan penerimaan dari PNBP Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya yang masing-masing mencapai Rp69,87 triliun

(153,3 persen dari APBN 2019) dan Rp59,76 triliun (63,53 persen dari APBN 2019). Sementara itu, komponen PNB dari SDA (baik SDA Migas dan Non Migas) lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2018, seiring dengan perkembangan harga komoditas global yang terus menurun dan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika yang semakin menguat. Sementara itu, Pendapatan BLU hingga Juli 2019 telah mencapai Rp24,39 triliun atau 50,92 persen dari target APBN 2019.

Disisi lain, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp1.236,54 triliun (50,2 persen dari pagu APBN), meningkat 7,93 persen (yoy) dibandingkan realisasi Juli 2018.

Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp761,47 triliun (46,6 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp475,07 triliun (57,5 persen dari pagu APBN). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan bulan Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,24 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, terutama diakibatkan oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp75,08 triliun (73,6 persen dari pagu) atau meningkat sebesar 33,5 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih tingginya realisasi belanja bantuan sosial tersebut mencerminkan komitmen konkret Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan mengurangi kesenjangan di Indonesia.

Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 tercatat sebesar Rp92,20 triliun atau 41,10 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN.

Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp68,11 triliun dan subsidi non-energi Rp24,09 triliun. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 lebih tinggi Rp0,94 triliun atau 1,03 persen dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018. Lebih tingginya realisasi subsidi dimaksud terutama dikarenakan realisasi subsidi non-energi yang lebih tinggi Rp3,84 triliun atau 18,99 persen daripada periode yang sama tahun 2018. Hal ini disebabkan adanya percepatan realisasi Subsidi Pupuk dan Subsidi Kredit Program dalam tahun 2019. Selain itu, percepatan realisasi subsidi pajak turut memberikan sumbangsih atas kenaikan realisasi subsidi non-energi. Di sisi lain, realisasi subsidi energi sampai dengan Juli justru lebih rendah Rp2,90 triliun atau 4,09 persen dari tahun lalu. Hal tersebut disebabkan terutamanya karena realisasi subsidi listrik yang lebih rendah Rp3,73 triliun atau 12,32 persen, seiring dengan penguatan Rupiah dan pergerakan *Indonesian Crude Price* (ICP) dalam semester I 2019.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Juli 2019 terus mengalami peningkatan.

Realisasinya telah mencapai Rp475,07 triliun atau 57,46 persen dari pagu APBN 2019, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp433,19 triliun (57,24 persen) dan

Dana Desa Rp41,88 triliun (59,83 persen). Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp420,61 triliun (58,05 persen), Dana Insentif Daerah (DID) Rp5,32 triliun (53,22 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp7,25 triliun (32,71 persen). Realisasi TKD sampai dengan Juli 2019 tersebut lebih tinggi Rp20,42 triliun atau sekitar 4,95 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2018. Tingginya realisasi TKD sampai dengan Juli 2019 tersebut terutama disebabkan karena: (1) meningkatnya realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 20,02 persen apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya peningkatan penyaluran DID tahap I kepada sebagian besar Pemerintah Daerah termasuk Pemda pada daerah yang terdampak bencana alam di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah; (2) penyaluran DBH yang lebih tinggi 19,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran DBH Pajak serta penyaluran sebagian kurang bayar DBH terutama DBH SDA Mineral dan Batubara serta SDA Gas Bumi berdasarkan PMK nomor: 77/PMK.07/2019; serta (3) realisasi Dana Keistimewaan DIY yang meningkat sebesar 20,00 persen yang diakibatkan karena tingginya penyaluran sampai

dengan semester I tahun 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan Juli 2019 lebih tinggi 6,02 triliun (16,78 persen) dibandingkan realisasi Dana Desa pada periode yang sama tahun 2018. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyelesaian penyaluran Dana Desa pada tahap I dan II seluruhnya kepada 434 daerah penerima.

Realisasi defisit APBN hingga Juli 2019 mencapai Rp183,71 triliun atau sekitar 1,14 persen PDB.

Sementara itu, posisi keseimbangan primer pada Juli 2019 berada pada posisi negatif Rp25,08 triliun. Realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah hingga Juli 2019 mencapai Rp229,73 triliun, terutama bersumber dari pembiayaan utang yaitu sebesar Rp234,13 triliun (65,2 persen dari pagu APBN). Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp241,19 triliun dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp7,06 triliun. Pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan utang secara *prudent* dan produktif antara lain dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang.

Realisasi APBN sampai dengan Juli 2019

Realisasi APBN sampai dengan 31 Juli 2019, pendapatan negara mampu tumbuh 5,85 persen, mencapai Rp1.052,83 triliun atau 48,63 persen dari target APBN tahun 2019. Sementara itu belanja negara meningkat 7,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja negara terserap Rp1.236,54 triliun atau 50,24 persen dari pagu APBN tahun 2019.

Adapun rincian dari realisasi tersebut meliputi:

Realisasi Penerimaan Perpajakan mencapai Rp810,75 triliun atau 45,39 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 3,93 persen dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2018 sebesar Rp780,05 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:

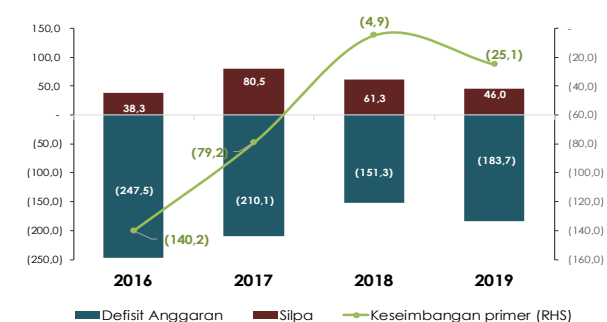
- Realisasi Penerimaan Pajak mencapai Rp705,59 triliun atau 44,73 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 2,68 persen (*yoy*).
- Realisasi Penerimaan

Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp105,16 triliun atau 50,36 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 13,21 persen (*yoy*).

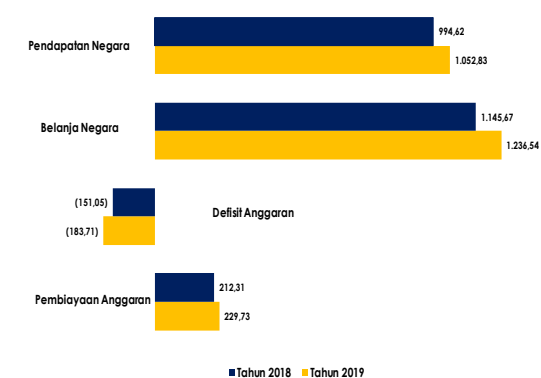
- PNBP mencatat realisasi sebesar Rp241,27 triliun atau 63,78 persen dari target APBN tahun 2019, tumbuh 14,21 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
- Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp761,47 triliun atau 46,59 persen dari pagu APBN tahun 2019, meningkat 9,24 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.
- TKDD mencapai Rp475,07 triliun atau 57,46 persen dari pagu APBN tahun 2019, tumbuh sebesar 5,89 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018.

Dengan capaian pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka realisasi Defisit APBN tahun 2019 sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai

Rp183,71 triliun atau 1,14 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer mencapai negatif Rp25,08 triliun. Realisasi Defisit APBN tahun 2019 tersebut lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2018 yakni Rp151,05 triliun atau 1,02 persen PDB, dengan nilai keseimbangan primer negatif Rp4,60 triliun. Dengan realisasi pembiayaan anggaran periode sampai dengan 31 Juli 2019 sebesar Rp229,73 triliun, termasuk untuk pembiayaan investasi Rp5,13 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp46,02 Triliun.



Realisasi APBN sampai dengan 31 Juli, 2018-2019



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi tetap terjaga seiring pelonggaran likuiditas global.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada Triwulan II tahun 2019 tumbuh sebesar 5,05 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan konsumsi dan kebijakan *countercyclical* belanja Pemerintah. Angka pertumbuhan ini dibawah angka pertumbuhan Triwulan I 2019 dan Triwulan II 2018 yang masing-masing sebesar 5,07 persen (yoy) dan 5,27 persen (yoy). Konsumsi tumbuh sebesar 5,39 persen didukung oleh semua komponen konsumsi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,17 persen sejalan dengan tingkat inflasi yang terjaga, serta adanya momentum Ramadan, Idul Fitri, dan libur sekolah. Komponen konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 15,27 persen didorong oleh adanya pelaksanaan Pemilu. Tingginya pengeluaran partai politik dan organisasi sosial menjadi faktor utama kinerja komponen ini. Konsumsi Pemerintah kembali tumbuh tinggi yaitu sebesar 8,23 persen. Penyerapan

realisasi belanja pegawai, barang, dan belanja lain-lain mendorong kinerja konsumsi Pemerintah, meskipun belanja bantuan sosial sedikit mengalami penurunan dibandingkan Triwulan sebelumnya. Pada Triwulan II 2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Sementara itu, Perdagangan internasional pada Triwulan II 2019 masih tertekan. Ekspektasi pertumbuhan positif pada sisi ekspor masih belum tercapai karena terbatasnya permintaan negara mitra dagang utama terhadap komoditas ekspor Indonesia serta penurunan harga komoditas. Ekspor tumbuh negatif 1,81 persen. Di sisi lain, impor mengalami kontraksi yang lebih dalam yaitu tumbuh negatif 6,73 persen. Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif kecuali sektor pertambangan.

Laju inflasi pada Juli 2019 relatif masih terkendali sebesar 0,31

persen (mtm) atau 2,36 persen (ytd) atau 3,32 persen (yoy).

Tekanan inflasi terutama berasal dari peningkatan harga aneka cabai dan biaya sekolah. Tingginya kenaikan aneka cabai dipengaruhi oleh musim kemarau panjang yang mengganggu produksi sehingga berdampak pada menurunnya pasokan. Sementara itu, seiring dengan masuknya tahun ajaran baru, inflasi juga terjadi pada biaya pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA (terutama sekolah swasta), serta tarif bimbingan belajar. Selain itu, tren peningkatan harga emas global juga mendorong terjadinya inflasi pada komoditas emas perhiasan. Di sisi lain, normalisasi permintaan masyarakat pasca periode Lebaran dan liburan sekolah mendorong penurunan seluruh tarif transportasi (tarif angkutan antarkota, kereta api, dan udara). Deflasi pada tarif angkutan udara juga disebabkan kebijakan penurunan tarif untuk kelas *low cost carrier* (LCC) pada hari Selasa, Kamis,

dan Sabtu di jam tertentu. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan penurunan tarif batas atas penerbangan kelas ekonomi full service di bulan Juni sebagai upaya Pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Nilai tukar Rupiah terus berada pada posisi yang stabil dan cenderung menguat seiring pelonggaran likuiditas global. Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat per 8 Agustus 2019 tercatat pada level Rp14.231 per dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, Rupiah mengalami apresiasi sebesar 1,62 persen (ytd) dibandingkan awal tahun 2019. Dari sisi eksternal, pelonggaran likuiditas global karena *The Fed* menurunkan suku bunga acuannya yang mengakibatkan aliran modal ke *emerging market*, termasuk Indonesia memberikan pengaruh terhadap penguatan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, prospek positif ekonomi nasional yang tetap terjaga, termasuk peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia, juga memberikan pengaruh terhadap penguatan nilai tukar. Hingga akhir Juli 2019, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang cukup tinggi, yakni sebesar USD125,9 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir Mei 2019 sebesar USD120,3 miliar. Posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7,3 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,41 persen atau menurun 0,25 poin pada Maret 2019, dibandingkan periode September 2018.

Secara jumlah, penduduk miskin pada Maret 2019 adalah sebesar 25,14 juta orang atau menurun 0,53 juta orang dari September 2018. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan gini ratio turun menjadi 0,382 atau menurun 0,002 poin dibandingkan periode September

2018. Kondisi ini menggambarkan meratanya pertumbuhan ekonomi dan tetap terjaganya inflasi. Selain itu, program bantuan sosial yang telah dilaksanakan Pemerintah secara tepat waktu memberi andil dalam penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sehingga menciptakan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



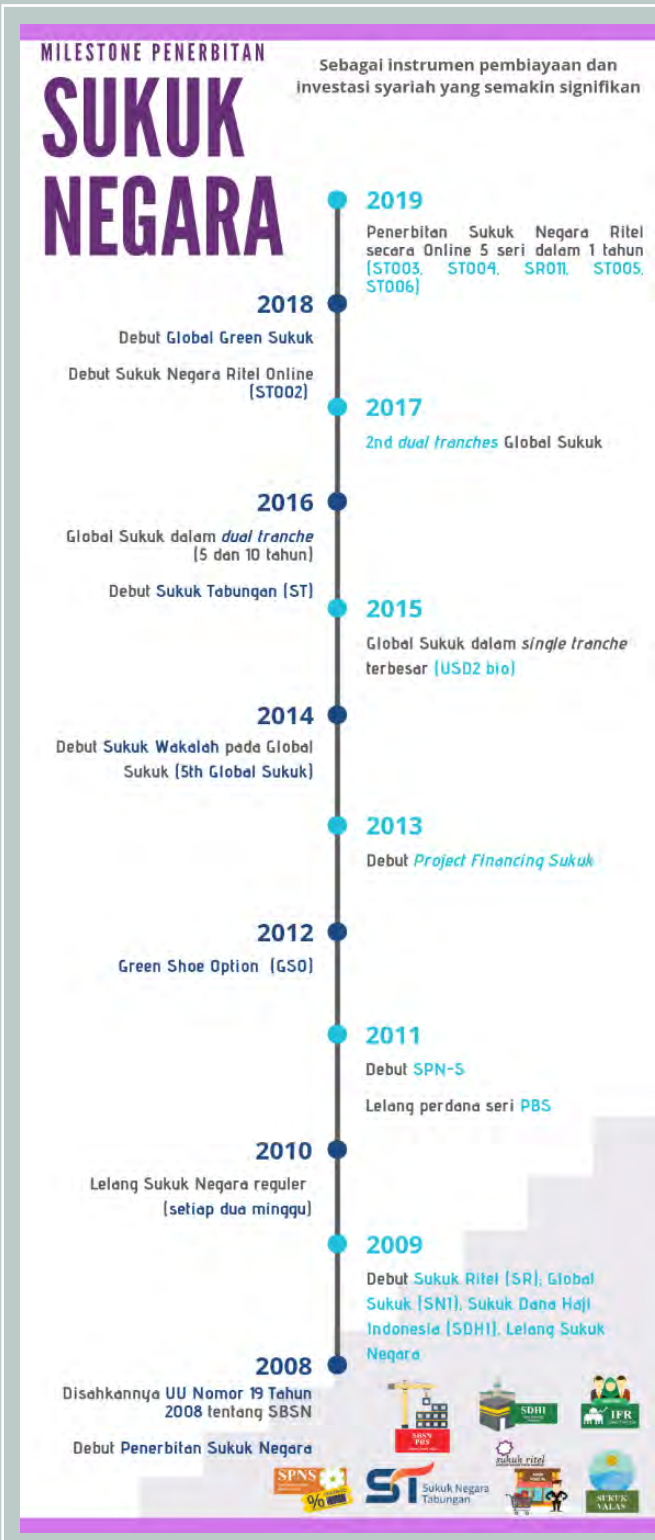
Sukuk Negara di Mata Masyarakat

Sudah lebih dari satu dasawarsa Sukuk hadir sebagai alternatif pembiayaan APBN. Sejak ditetapkannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong perkembangan keuangan syariah melalui penerbitan Sukuk, yang telah dibuktikan dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berinvestasi serta terbangunnya berbagai jejak infrastruktur di tanah air.

SBSN atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah, yang ditujukan untuk membiayai defisit APBN. Sukuk Negara memiliki 7 jenis instrumen yang ditujukan untuk investor institusi dan individu, baik di pasar domestik dan internasional, yang terdiri dari: Project Financing Sukuk (PFS), Sukuk Ritel, Sukuk Tabungan, Global Sukuk (SNI), Islamic Fixed Rate Sukuk (IFR), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S), dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Pemerintah juga telah mengembangkan 4 jenis struktur

akad Sukuk, yaitu Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Al Khadamat, SBSN Ijarah Asset to be Leased, dan SBSN Wakalah. Sesuai dengan kaidah syariah, Sukuk Negara mensyaratkan adanya jaminan (underlying asset) dan fatwa serta opini syariah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aset yang dapat dijadikan jaminan oleh Sukuk harus mempunyai nilai ekonomis atau memiliki aliran penerimaan kas untuk menghindari terjadinya transaksi “money for money” atau transaksi uang dengan uang yang diharamkan agama. Underlying asset SBSN dapat berupa Barang Milik Negara (BMN), Proyek/kegiatan, jasa layanan haji, atau kombinasi dari ketiga aset tersebut.

Tidak berhenti pada 7 jenis instrumen sukuk, Pemerintah terus berupaya untuk mengembangkan terobosan-terobosan baru dalam menerbitkan Sukuk Negara, antara lain: debut PFS pada 2013, penerbitan Green Global Sukuk pertama kali yang mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,4 kali, dan SBN Ritel Online untuk sukuk ritel dan sukuk tabungan yang mulai didengungkan pada 2018. Selain itu, terdapat rencana penerbitan Waqf-Linked Sukuk yang masih terus



diproses oleh Pemerintah.

Hingga Juli 2019, Pemerintah telah menerbitkan 11 seri sukuk ritel dan 4 seri sukuk tabungan dengan total akumulasi penerbitan masing-masing mencapai Rp165,8 triliun dan Rp13,3 triliun, serta mencakup total investor masing-masing sebanyak 278.390 orang dan 54.275 orang. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah, terutama sejak 2018 penerbitan SBN Ritel telah dilaksanakan secara online yang semakin mempermudah masyarakat untuk berinvestasi. Kemudahan pembelian secara online tersebut berhasil menjadikan penerbitan ST002, ST003, SR011, ST004 berulang kali mencatatkan kelebihan permintaan dari target awal Pemerintah. Penjualan SBN ritel secara online juga meningkatkan persentase investor dari kalangan generasi milenial pada penerbitan ST002, ST003 dan ST004 yang masing-masing mencapai 44,61 persen; 51,74 persen; dan 51,80 persen. Peningkatan jumlah milenial sebagai investor SBN ritel merupakan hal yang menggembirakan karena generasi millennial merupakan generasi yang “melek” informasi.

Dalam perjalanannya, selain untuk program pembangunan infrastruktur, program menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu fokus Pemerintah dalam pembangunan dan Sukuk menjadi sarana



Pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk pertama kalinya pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia menerbitkan Green Global Sukuk sebagai bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah atas perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Penerbitan sebanyak USD3 miliar tersebut dilakukan pada Maret 2018, dan menjadi penerbitan green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (the world's first sovereign green sukuk). Pada Februari 2019, Pemerintah kembali menerbitkan Green Sukuk Global senilai total USD2 miliar. Penerbitan Green Global Sukuk oleh Indonesia terbukti mampu menarik investor dengan capaian kelebihan permintaan masing-masing sebanyak 2,5 kali dan 3,8 kali. Tak hanya itu, penerbitan Green Global Sukuk oleh Indonesia tak luput dari sorotan dunia, sehingga dapat menghasilkan

berbagai prestasi antara lain: **Green Bond Pioneer Award** dari Climate Bond Initiative; **Sovereign Deal of the Year** dan **Deal of the Year** dari Islamic Financing News; **Asia Pacific Green/SRI Bond Deal of the Year** dari Global Capital, Euromoney; serta **SRI Bond, Islamic Issue** dan **SRI Capital Market Issue of the Year** dari International Financing Review Asia, serta **Most Innovative Debt Management Office (DMO) Issuer of Sovereign Sukuk** pada acara London Sukuk Summit. Diterimanya penghargaan tersebut menunjukkan apresiasi dunia internasional atas komitmen dan kontribusi Pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan Syariah di dunia serta upaya Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui penerbitan instrumen pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Sementara itu, nilai pembiayaan proyek melalui SBSN (PFS) mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dimulai pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp800 miliar, pada 2019 nilai pembiayaannya telah terakumulasi sebesar Rp90,91 triliun. Selama periode tersebut, Pemerintah telah berhasil membiayai berbagai proyek untuk kesejahteraan rakyat, antara lain jalan dan jembatan di 30 provinsi; jalur KA di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi; asrama haji di 24 kota/kabupaten; 701 kantor urusan agama dan manasik haji; gedung perkuliahan di 54 perguruan tinggi Keagamaan Islam; 32 madrasah; dan 328 pengelolaan sumber daya air; serta 3 taman nasional.

Jembatan Holtekamp, Ikon Baru Masyarakat Papua

“Dulu sih, waktu mau ke Koya atau

mau ke Hall itu kan harus butuh waktu satu jam lewat jalan yang biasa sana. Sekarang semenjak ada jembatan kan, waktunya lebih dipersingkat, jalannya juga lebih bagus”, demikian cuplikan dari testimoni masyarakat atas salah satu hasil pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh SBSN, yaitu Jembatan Holtekamp.

Jembatan Holtekamp merupakan jembatan pelengkung pertama terbesar secara utuh yang dibuat di luar lokasi pekerjaan di Indonesia, yang dirakit dan diangkut dari PT PAL Surabaya. Jembatan merah yang melintangi Teluk Youtefa dengan panjang 732 meter ini menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami, Provinsi Papua, yang digadang-gadang sebagai ikon baru kebanggaan Papua karena desainnya yang elegan dan menarik.

Jembatan Holtekamp dibangun sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan permukiman kota Jayapura yang semakin padat, yang akan dialihkan menuju Distrik Muara Tami. Pemerintah optimis bahwa pembangunan Jembatan Holtekamp akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jayapura dan bermanfaat sebagai penghubung perekonomian antara Indonesia dengan Papua Nugini yang selama ini telah berjalan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skow.

Selain itu, Jembatan Holtekamp juga diyakini akan mendukung pengembangan potensi pariwisata di Jayapura, terutama Pantai Hamadi dan Pantai Holtekamp. Tak kalah menarik, PLBN Skow yang telah direhabilitasi dengan pembangunan gedung berdesain “rumah tangfa” atau rumah pesisir serta pemandangan laut lepas yang dapat dinikmati dari atas menara PLBN menjadi nilai tambah tersendiri bagi potensi wisata di sekitar Jembatan Holtekamp.

Kontribusi Sukuk Negara untuk Pendidikan Indonesia

Kontribusi Sukuk Negara di dalam dunia Pendidikan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Sampai dengan 2019, Sukuk Negara sudah menunjukkan kiprahnya dengan membiayai gedung perkuliahan serta sarana dan prasarana di 54 perguruan tinggi Keagamaan Islam serta 32 madrasah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebut saja pembangunan perpustakaan dan rumah guru

di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Siak, Riau. Pembangunan perpustakaan MAN IC Siak memudahkan para siswa untuk mencari buku-buku sebagai tambahan referensi belajar dan bermanfaat sebagai tempat belajar yang kondusif di luar jam pelajaran. MAN IC Siak merupakan salah satu sekolah menengah ke atas berbasis Agama Islam yang dimiliki pemerintah dengan sistem asrama dan jam pelajaran full day. Dengan sistem tersebut, tentunya MAN IC Siak dituntut untuk menyediakan fasilitas yang lengkap, termasuk pendampingan dan pengawasan guru di luar jam efektif belajar-mengajar. Di sinilah Sukuk Negara hadir dan berperan dalam membiayai pembangunan rumah guru untuk memudahkan mobilitas guru dalam melakukan pendampingan dan pengawasan, seperti yang dirasakan oleh Bapak Jasri, Guru Fiqh MAN IC Siak. “Dulu saya bolak-balik dari Madrasah ke rumah, dan sekarang Alhamdulillah perumahan sudah ada. Saya jadi dekat ke sekolah.” ujarnya.

Bergeser ke ranah perguruan tinggi, Sukuk Negara telah berkontribusi membiayai pembangunan gedung perkuliahan serta sarana dan prasarana di berbagai perguruan tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, antara lain UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Metro Lampung, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, IAIN Cirebon, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, IAIN Kudus, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Surakarta, IAIN Palangkaraya, IAIN Fattahul Muluk Jayapura, dan lain-lain. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibangun





dari Sukuk Negara merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perkuliahan, khususnya gedung perkuliahan yang merupakan tempat utama dalam proses belajar-mengajar. Efektifitas kegiatan belajar-mengajar tentu sangat dipengaruhi oleh kenyamanan dan kondusifitas dari gedung perkuliahan. “Kami lebih konsen dalam belajar karena kan sebelumnya sebelum dibangun gedung ini, kami kan belajarnya pindah-pindah gedung” ujar salah satu mahasiswa jurusan peternakan UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau. Ia berterima kasih atas pembangunan Gedung Perkuliahan Terpadu UIN Suska Riau yang rampung dibangun pada 2018, karena sebelumnya terdapat kekurangan gedung. Selain Gedung Perkuliahan Terpadu, UIN Suska Riau juga mendapatkan alokasi pembiayaan dari Sukuk Negara untuk pembangunan Gedung Laboratorium pada 2017 dan Pembangunan Gedung Dosen pada

2018.

Kampus keagamaan lain yang dibiayai oleh Sukuk Negara adalah UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, yang mendapat alokasi pembiayaan untuk pembangunan Gedung Perkuliahan II pada 2016 sebesar Rp40,72 miliar, Gedung Pascasarjana pada 2017 sebesar 45,72 miliar, dan pembangunan Gedung Ruang Kuliah Bersama dan Gedung Laboratorium Terintegrasi MIPA pada 2019 dengan alokasi sebesar Rp30,00 miliar yang baru saja dilakukan peletakan batu pertamanya pada 17 Juli lalu. Rektor UIN Sunan Gunung Djati, Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, menyampaikan bahwa pendanaan pembangunan melalui SBSN telah meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan menjadi kebanggaan bagi seluruh keluarga besar UIN SGD Bandung. “Saya membayangkan seandainya proyek SBSN ini terus berkembang tentu akan menjadi solusi untuk



percepatan kemajuan Pendidikan bangsa sehingga target pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dapat segera tercapai.” harapnya. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah pembangunan gedung perkuliahan yang dimulai pada 2016, terjadi lompatan jumlah peminat UIN SGD Bandung, bahkan sampai pada titik di luar dugaan. Sebelumnya, jumlah peminat UIN SGD Bandung hanya berkisar 4.000 sampai 50.000 peminat, yang meningkat menjadi sekitar 60.000 peminat pada 2016 dan mencapai sekitar 85.000 peminat pada 2019. Selain itu, pembangunan gedung-gedung perkuliahan UIN SGD Bandung mampu meningkatkan daya tampung mahasiswa dari sebelumnya berkisar antara 3.000 sampai dengan 4.000 mahasiswa, kini mampu menampung sebanyak 6.000 mahasiswa.

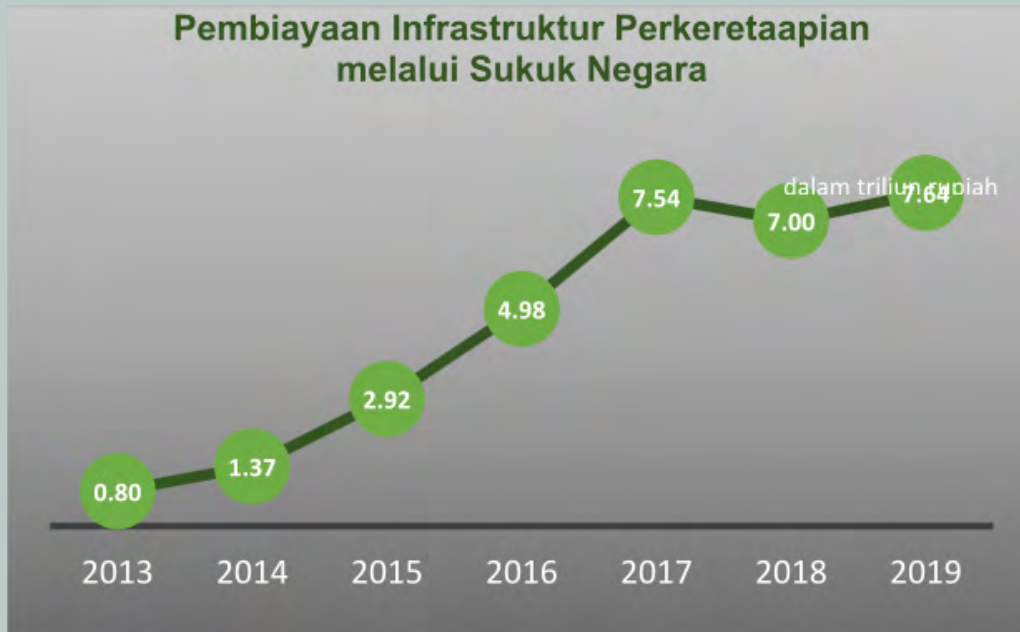
Sukuk Negara Biayai Pembangunan Jalur Kereta Api Tuk Perkuat

Konektivitas Antarwilayah

Sejak lima tahun terakhir, Pemerintah mulai gencar melakukan pembangunan infrastruktur di semua bidang, tak terkecuali di bidang perkeretaapian. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian meliputi pembangunan dan reaktivasi jalur kereta api, sampai dengan pembangunan dan modernisasi stasiun, yang tentunya memakan biaya tak sedikit. Salah satu alternatif pembiayaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur perkeretaapian adalah melalui Sukuk Negara, yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Debut PFS pada 2013 mencatat alokasi pembiayaan infrastruktur melalui Sukuk Proyek mencapai 800 miliar, yang seluruhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Alokasi tersebut terus meningkat sampai pada tahun 2017 yang mencapai 7,5 triliun, namun turun menjadi 7,0 triliun pada 2018, dan kembali meningkat pada tahun 2019 dengan alokasi pembiayaan sebesar 7,6 triliun.

Pembiayaan Sukuk Negara untuk proyek perkeretaapian pada 2019 meliputi penyelesaian infrastruktur perkeretaapian Trans Sulawesi (Pare-Pare – Makassar) yang merupakan jalur kereta api pertama di Sulawesi setelah Indonesia merdeka; pembangunan jalur ganda (double track) Bogor-Sukabumi dan Selatan Jawa yang

Pembiayaan Infrastruktur Perkeretaapian melalui Sukuk Negara



terbentang dari Cirebon-Kroya-Solo hingga Madiun-Jombang-Surabaya; elektrifikasi jalur lintas KA Jogja-Solo; pembangunan fasilitas perkeretaapian di Manggarai sampai dengan Jatinegara dan Bekasi sampai dengan Cikarang; serta pengembangan sarana perkeretaapian Trans Sumatera.

Pembangunan jalur ganda yang terus diupayakan Pemerintah sangat berdampak pada percepatan dan keamanan arus perjalanan kereta api. Dengan adanya jalur ganda, lalu lintas rel diyakini lebih aman sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan kereta api jika dibandingkan pada saat jalur kereta api masih tunggal. Selain itu, pembangunan jalur ganda juga berpengaruh pada peningkatan kapasitas dan frekuensi perjalanan kereta api yang memungkinkan untuk meningkatkan akses dan mobilitas

penggunanya. Contohnya pada pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya yang dilengkapi dengan adanya terowongan Notog Baru yang telah beroperasi sejak Februari 2019. Terowongan Notog Baru merupakan terowongan jalur ganda pertama di Indonesia, dan bernilai sebesar Rp1,45 triliun yang berasal dari Sukuk Negara. Terowongan sepanjang 471 meter ini dibangun di sisi selatan terowongan eksisting dengan lengkung R-800 dari terowongan eksisting yang mempunyai lengkung R-500 sehingga dapat memangkas jarak tempuh perjalanan kereta api dari Notog sampai dengan Kebasen sejauh 300 meter.

Langkah yang diambil Pemerintah untuk berbenah menyediakan infrastruktur perkeretaapian dinilai sudah tepat mengingat

saat ini masyarakat mulai beralih menggunakan moda kereta api, baik kereta api lokal maupun jarak jauh. Hal ini didukung oleh peningkatan kualitas layanan perkeretaapian yang selalu diupayakan oleh PT KAI (Persero) dan Pemerintah, misalnya: ketersediaan pendingin udara di setiap gerbong kereta, bahkan untuk kereta lokal dan kereta kelas ekonomi; revitalisasi dan modernisasi stasiun; pembangunan jalur kereta baru dan jalur ganda (double track); dan kemudahan akses pemesanan, perubahan jadwal, dan pembatalan

tiket kereta api melalui aplikasi. Dengan begitu, perjalanan melalui kereta api menjadi lebih nyaman, mudah, dan efisien sehingga masyarakat mulai memilih untuk bepergian dengan kereta api, dan kemacetan pun akan berkurang. Tak hanya mempercepat arus manusia, kereta api juga berjasa mempercepat distribusi barang dan komoditas. Pengangkutan barang melalui kereta api menawarkan volume yang lebih besar dan waktu pengiriman yang jauh lebih cepat dan pasti, sehingga ongkos distribusi barang dan komoditas dapat ditekan menjadi lebih rendah. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah di seluruh Indonesia dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

INOVASI PEMBIAYAAN KREATIF RAIH BERBAGAI PENGHARGAAN

Prestasi Green Global Sukuk Indonesia

	Green Bond Pioneer Award Climate Bond Initiative, 2018		Sovereign Deal of The Year Islamic Financing News, 2018
	Deal of The Year Islamic Financing News, 2018		Asia Pacific Green/ SRI Bond Deal of The Year Global Capital, Euromoney, 2018
	SRI Bond, Islamic Issue International Financing Review Asia, 2018		SRI Capital Market Issue of The Year International Financing Review Asia, 2018
	Best ESG Deal Finance Asia, 2018		Most Innovative DMO Issuer of Sovereign Sukuk London Sukuk Summit, 2019

Penggunaan BMN sebagai Underlying Asset dalam Penerbitan SBSN

Salah satu strategi dan kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dilakukan melalui upaya pengelolaan keuangan negara secara optimal. Hal tersebut diwujudkan melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dengan menciptakan nilai tambah yang dapat memberikan kontribusi bagi negara baik berupa penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maupun efisiensi dan efektifitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu bentuk optimalisasi dalam pengelolaan BMN sebagai sumber APBN dilakukan melalui penggunaan BMN sebagai *underlying asset* dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

SBSN atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh

pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Prinsip keuangan syariah mengharuskan adanya *underlying asset* untuk menghindari terjadinya transaksi *'money for money'* yang dapat dikategorikan sebagai riba.

Underlying asset adalah obyek yang menjadi dasar transaksi penerbitan sukuk. BMN yang dijadikan sebagai *underlying asset* adalah BMN berupa tanah serta gedung dan bangunan dengan kriteria tertentu. Pengaturan penggunaan BMN sebagai *underlying asset* SBSN/Sukuk Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (UU 19/2008).

UU 19/2008 memiliki kekhususan (*Lex specialis*) terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang antara lain mengatur mengenai pengelolaan BMN (pemindahtanganan BMN). Dalam Penjelasan Pasal 11 ayat

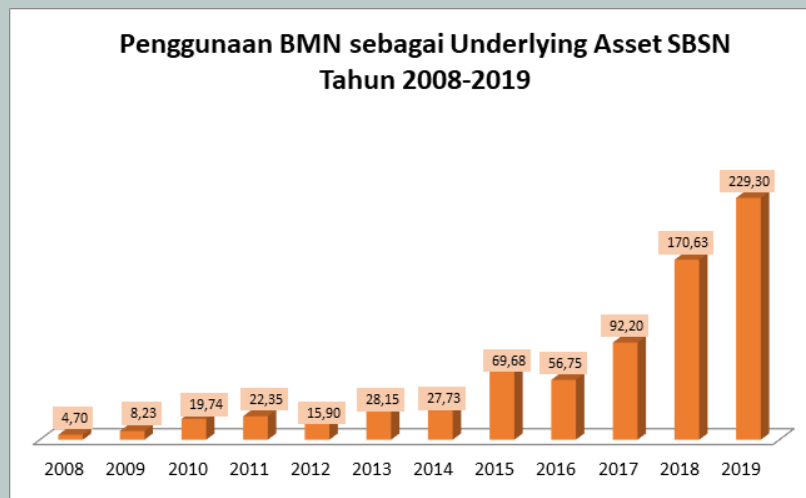
(1) UU 19/2008 dinyatakan bahwa "Pemindahtanganan Barang Milik Negara bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sifat pemindahtanganan dimaksud, antara lain: (i) penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas Hak Manfaat Barang Milik Negara; (ii) tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (*legal title*) Barang Milik Negara; dan (iii) tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan".

Penggunaan BMN sebagai *underlying asset* penerbitan SBSN sampai saat ini masih belum dipahami secara utuh dan komprehensif oleh banyak pihak sehingga menimbulkan kesalahpahaman atas penggunaan BMN tersebut. Berdasarkan ketentuan

Pasal 11 dan Pasal 12 UU 19/2008 tentang SBSN, telah diatur dengan jelas bahwa penggunaan BMN sebagai Aset SBSN dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan Hak Manfaat atas BMN tersebut, dimana Pemerintah wajib membeli kembali Aset SBSN yang dijadikan sebagai *underlying* pada saat jatuh tempo, sehingga tidak ada lagi celah hukum yang memungkinkan beralihnya BMN kepada investor SBSN ataupun pihak lain.

Penerbitan SBSN baik secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit SBSN dilakukan untuk kepentingan Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerbitan SBSN tersebut dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri. Penerbitan SBSN oleh Perusahaan Penerbit SBSN dilakukan hanya dalam hal struktur SBSN memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle (SPV)*.

Penerbitan SBSN sebagai salah satu instrumen pembiayaan Pemerintah dalam APBN dilakukan sejak tahun 2008. Nilai BMN yang dijadikan *underlying asset* untuk penerbitan SBSN sampai dengan Semester I 2019 sebesar Rp745,36 triliun dengan rincian sebagai berikut:



Adapun nilai BMN sampai dengan semester I 2019 yang sedang digunakan (*outstanding*) sebagai *underlying asset* SBSN adalah Rp209,85 triliun. Apabila dibandingkan dengan nilai BMN berupa tanah dan bangunan sesuai Laporan BMN Tahun 2018 (*audited*) sebesar Rp4.750,02 triliun, persentase penggunaan BMN yang dijadikan *underlying asset* adalah sebesar 4,42 persen dari keseluruhan total BMN berupa tanah dan bangunan.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



PENDAPATAN PAJAK

Masuki Semester II, Penerimaan Pajak
Terkumpul Rp705,59 Triliun

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi
Penerimaan
Pajak s.d.
Juli 2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - Juli 2019		
		Δ% 2018 - 2019	% thd Target	
Pajak Penghasilan	894,45	440,17	4,66 %	49,21 %
- Migas	828,29	404,67	5,27 %	48,86 %
- Non Migas	66,15	35,50	-1,84 %	53,66 %
PPN & PPnBM	655,39	249,40	-4,55 %	38,05 %
PBB & Pajak Lainnya	27,71	16,02	201,79%	53,66 %
Jumlah	1.577,56	705,59	2,68 %	44,73 %

*angka sementara per Mei 2019

Memasuki bulan pertama Semester II 2019 ini, capaian penerimaan pajak telah mencapai 44,73 persen dari target APBN 2019. Sampai dengan

31 Juli 2019, penerimaan pajak yang diterima di Kas Negara mencapai Rp705,59 triliun dari Rp1.577,56 triliun yang ditargetkan. Dibandingkan dengan periode yang sama (Januari

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi		Δ%
	Jan-Juli 2019	Jan-Juli 2018-2019	
PPH Pasal 21	91,56	12,31 %	
PPH Pasal 22	9,97	8,07 %	
PPH Pasal 25/29	147,70	1,70 %	
- Badan	8,50	15,90 %	
- Orang Pribadi	139,19	0,94 %	
PPH Final	65,28	4,52 %	
PPN Dalam Negeri	149,93	-4,68 %	
Pajak atas Impor	136,39	-2,99 %	
- PPh 22 Impor	32,39	1,20 %	
- PPN Impor	97,28	-4,52 %	
- PPnBM Impor	2,63	5,34 %	

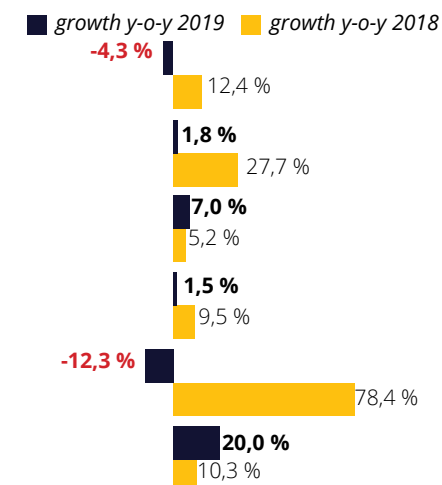
Pertumbuhan Penerimaan Pajak

– Juli) tahun lalu, penerimaan pajak tumbuh 2,68 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja PPh Nonmigas yang tumbuh 5,27 persen (*yoy*).

Bila kita lihat lebih dalam, kontributor utama pertumbuhan PPh Nonmigas berasal dari jenis pajak PPh Pasal 21, yang tumbuh *double digits* 12,31 persen (*yoy*). Sebagai *withholding tax* yang dipotong dari gaji / honorarium yang diterima oleh pekerja / karyawan, stabilnya fundamental kondisi ketenagakerjaan (*employment*) menjadi faktor utama pendorong penerimaan. Menurut data terbaru, Upah Nominal Buruh / Pekerja bulan Juni 2019 masih menunjukkan peningkatan, yang dibarengi peningkatan pemerataan pendapatan, ditandai oleh turunnya Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,002 poin terhadap September 2018.

Jenis pajak lainnya yang juga tumbuh *double digits* adalah PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Sampai dengan bulan Juli ini kinerjanya cukup menggembirakan, tumbuh 15,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi merupakan salah satu jenis pajak yang mengalami peningkatan kinerja akibat perluasan basis pembayar pajak (*tax base*) pasca program *Tax Amnesty* (TA). Namun demikian, jenis pajak ini menunjukkan sinyal normalisasi pasca TA, ditandai dengan telah setaranya pertumbuhan setoran Wajib Pajak non-Peserta TA dengan pertumbuhan Wajib Pajak Peserta TA, yang mengisyaratkan bahwa kinerja PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi saat ini telah mulai merefleksikan kondisi riil kesetimbangan baru.

Industri Pengolahan	Rp 187,72 T	28,7 %
Perdagangan	Rp 135,67 T	20,8 %
Jasa Keuangan	Rp 95,26 T	14,6 %
Konstruksi & Real Estat	Rp 42,13 T	6,5 %
Pertambangan	Rp 37,32 T	5,7 %
Transportasi & Pergudangan	Rp 28,17 T	4,3 %



* penerimaan pajak sektoral non migas, non PBB, dan non PPh DT

Penerimaan Pajak Sektoral

Jenis PPh Nonmigas lain yang juga tumbuh cukup sehat adalah PPh Pasal 22 dan PPh Final. PPh Pasal 22 tumbuh 8,07 persen (*yoy*) terutama disumbang oleh kinerja Sektor Ketenagalistrikan, sedangkan PPh Final tumbuh 4,52 persen (*yoy*) dengan Sektor Jasa Keuangan & Asuransi sebagai kontributor utama.

Sementara itu, PPh Pasal 25/29 Badan tumbuh 0,94 persen (*yoy*) atau mengalami perlambatan dibandingkan kinerja tahun lalu. Hal ini disebabkan tingginya restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak) serta perlambatan pertumbuhan laba korporasi 2018 secara umum. Apabila restitusi dikeluarkan dari perhitungan, PPh Pasal 25/29 secara bruto sebenarnya tumbuh 3,09 persen (*yoy*). Lebih jauh, efek peningkatan restitusi paling dirasakan oleh jenis pajak PPN Dalam Negeri, yang mengakibatkan

pertumbuhan menjadi negatif 4,68 persen (*yoy*), meski secara bruto tumbuh 4,77 persen (*yoy*).

Beralih pada pajak-pajak atas impor, PPnBM Impor mencatatkan pertumbuhan 5,34 persen (*yoy*). Pertumbuhan ini ditopang oleh Sektor Perdagangan Otomotif, mengalami peningkatan signifikan dalam dua bulan terakhir. Namun demikian, pertumbuhan PPh Pasal 22 Impor mengalami perlambatan, tumbuh 1,20 persen (*yoy*), dan PPN Impor mengalami pertumbuhan negatif 4,52 persen (*yoy*), sebagai akibat moderasi nilai impor Indonesia. Secara kumulatif, nilai impor periode Januari sampai dengan Juni 2019 mengalami penurunan 7,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Di sisi lain, penurunan nilai ekspor komoditas Migas serta perlambatan

harga komoditas khususnya produk energi telah memberikan tekanan terhadap penerimaan PPh Migas yang tumbuh negatif 1,84 persen (yoy). Namun demikian, pergeseran waktu pembayaran PBB Migas lebih awal, dari bulan Oktober dan November di tahun 2018 menjadi bulan Juni di tahun 2019, mengakibatkan pertumbuhan jenis pajak PBB & Pajak Lainnya mencapai 201,79 persen (yoy).

Dari sisi sektoral, sektor-sektor utama penyumbang penerimaan pajak menunjukkan kinerja yang menggemblirakan, terutama sektor

Transportasi & Pergudangan yang tumbuh *double digits* hingga 20,0 persen (yoy) serta sektor Jasa Keuangan & Asuransi yang tumbuh 7,0 persen (yoy). Namun demikian, tekanan restitusi dan imbas moderasi aktivitas impor cukup terasa pada sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan. Apabila dikecualikan dari perhitungan, pertumbuhan bruto non-impor kedua sektor ini sebenarnya relatif baik, masing-masing sebesar 5,8 persen (yoy) untuk sektor Industri Pengolahan dan 7,6 persen (yoy) untuk sektor Perdagangan.

Hari Pajak 2019 : Bersama Dukung Reformasi Perpajakan

Di bulan Juli ini jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, memperingati hari yang spesial. Ini karena sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Pajak, tanggal 14 Juli ditetapkan untuk diperingati sebagai Hari Pajak. Pertama kali diperingati pada tahun 2018 yang lalu lalu menjadikan peringatan tahun ini sebagai peringatan Hari Pajak yang kedua. Tanggal 14 Juli dipilih untuk mengingatkan eratnya kaitan perpajakan dengan pembentukan NKRI. Latar belakang penetapan Hari

Pajak mengacu pada kata “pajak” yang muncul dalam “rancangan UUD kedua” yang disampaikan pada tanggal 14 Juli 1945 pada Bab VII Hal Keuangan, Pada Pasal 23 menyebutkan pada butir kedua, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.”

Peringatan Hari Pajak tahun ini mengambil tema “bersama dukung reformasi perpajakan”. Inti rangkaian acara Hari Pajak 2019 diperingati dengan upacara bendera yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati di lapangan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP),





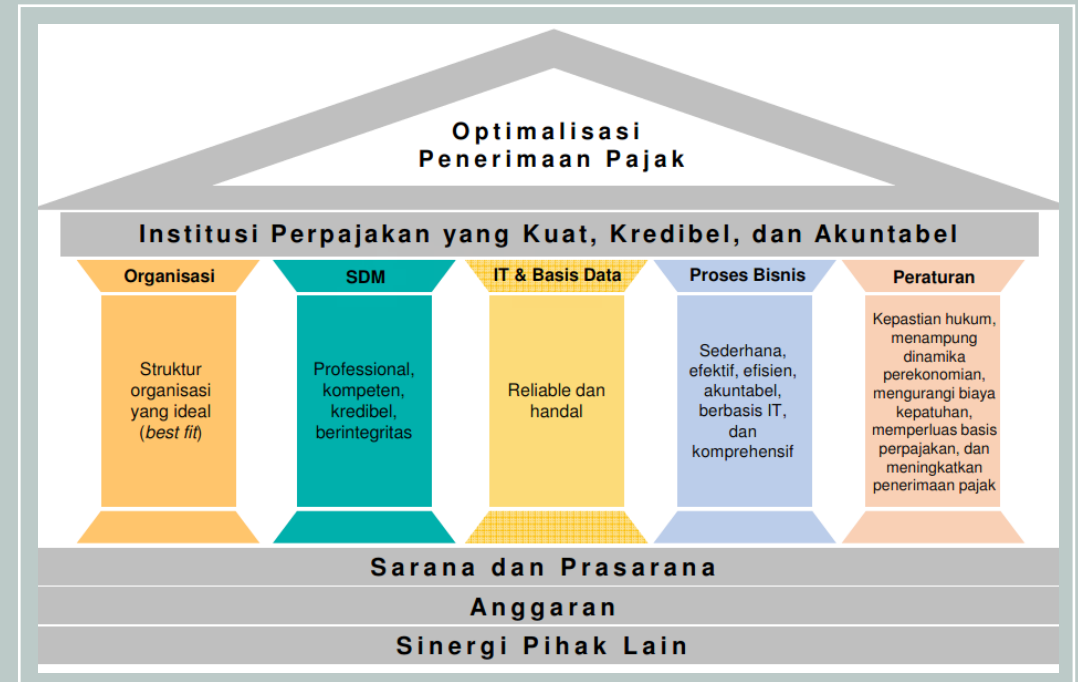
Jakarta, pada hari Senin 15 Juli 2019. Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyoroti pentingnya peran serta seluruh pegawai untuk tetap gencar mendukung reformasi perpajakan, demi mewujudkan penerimaan negara yang berkeadilan. “Saya ingin seluruh insan pajak untuk terus mengibarkan api reformasi perpajakan yang sudah dicanangkan Pemerintah,” jelasnya

Sekilas Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan yang disebut oleh Sri Mulyani, dan yang menjadi tema Hari Pajak 2019, merupakan sebuah proses yang panjang, diawali dengan reformasi birokrasi yang menitikberatkan kepada modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pembaca mungkin ingat bahwa antara tahun 2002 – 2008 terjadi perubahan struktur organisasi DJP dengan

pembentukan kantor-kantor pajak modern, mengusung konsep *Small Tax Office* (Pratama), *Medium Tax Office* (Madya) dan *Large Tax Office* (KPP WP Besar dan Khusus). Ini dikenal sebagai Reformasi Perpajakan Jilid I.

Pasca reorganisasi, semangat reformasi terus berlanjut dengan terobosan-terobosan seperti pembentukan *call center* Kring Pajak, pembentukan *Document Processing Center* (PPDDP dan KPDDP), pembentukan Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), serta penerapan teknologi informasi seperti sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing*), pelaporan SPT secara elektronik (*e-SPT* dan *e-filing*) serta penerbitan faktur pajak secara elektronik (*e-tax invoice*). Di sisi kebijakan, program-program seperti *Sunset Policy* juga menuai banyak



pujian baik dari dalam maupun luar negeri. Periode 2009 – 2014 ini yang kita kenal sebagai Reformasi Perpajakan Jilid II.

Seiring dengan semakin integralnya peranan perpajakan terhadap Keuangan Negara, kesinambungan Reformasi Perpajakan pun menjadi semakin penting. Pasca *Tax Amnesty*, kini Reformasi Perpajakan telah memasuki Jilid III, yang melibatkan perubahan komprehensif dalam lima pilar utama, yakni organisasi; SDM; IT dan Basis Data; Proses Bisnis; dan Peraturan Perpajakan. Pada akhir tahun 2020, diharapkan reformasi terkait organisasi, SDM, dan peraturan telah rampung. Sedangkan untuk IT dan Basis Data serta Proses Bisnis, dicanangkan akan selesai pada tahun 2024. Beberapa produk Reformasi Perpajakan Jilid III

yang telah terselesaikan diantaranya program penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5 persen (PP 23 Tahun 2018), program percepatan restitusi, peningkatan kepatuhan WP peserta TA, serta *roll-out* sistem *Compliance Risk Management* (CRM).

Pemberian Anugerah dan Penghargaan

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memberikan penganugerahan kepada sepuluh tokoh perpajakan yaitu Salamun A.T. (Dirjen Pajak masa 1981-1988), Fuad Bawazier (Dirjen Pajak masa 1993-1998), Abdullah Anshari Ritonga (Dirjen Pajak masa 1999-2000), Machfud Sidik (Dirjen Pajak masa 2000-2001), Hadi Poernomo (Dirjen Pajak masa 2001-2006), Darmin Nasution (Dirjen Pajak masa



2006-2009), Mochammad Tjiptardjo (Dirjen Pajak masa 2009-Januari 2011), Ahmad Fuad Rahmany (Dirjen Pajak masa 2011-2015), Sigit Priadi Pramudito (Dirjen Pajak masa Januari 2015-Desember 2015), dan Ken Dwijugasteadi (Dirjen Pajak masa 2015-2017).

Penganugerahan ini juga telah diberikan kepada Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI yang pertama kali mengusulkan pemungutan pajak harus diatur hukum), Sutadi Sukarya (Dirjen Pajak masa 1970-1981), dan Mar'ie Muhammad (Dirjen Pajak masa 1988-1993) pada peringatan Hari Pajak 2018 sebelumnya.

Acara penganugerahan juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-11 RI masa 2009-2014 Boediono, Menteri Keuangan RI masa 2010-2013 Agus

Martowardoyo, Menteri Keuangan RI masa 2013-2014 Muhammad Chatib Basri, dan Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo.

Selanjutnya, Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada unit kerja terbaik di lingkungan Ditjen Pajak yaitu kepada Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam, KPP Pratama Cikupa, dan KPP Pratama Gambir Tiga. Pada peringatan Hari Pajak 2019 juga diputar Sejarah Reformasi Perpajakan yang dimulai sejak 1983 hingga kini. Selain itu, Menteri Keuangan RI membuka *BDS fair* yang berisi *talk show* dengan para master UMKM, bedah buku, *battle puisi*, bazaar, dan performa musik.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi
Penerimaan Bea
dan Cukai s.d.
31 Juli 2019

No.	Jenis Penerimaan	APBN 2019	Realisasi s.d. Juli 2019		Pertumbuhan (yoy)		% Capaian
			2018	2019	%2018	%2019	
1	BEA MASUK	38.90	21.42	20.69	14.61	-3.42	53.18
2	CUKAI	165.50	67.56	82.62	14.22	22.30	49.92
3	BEA KELUAR	4.42	3.91	1.85	98.95	-52.72	41.83
	TOTAL	208.82	92.89	105.16	16.40	13.21	50.36
	PPN Impor		101.89	97.28	27.46	-4.52	
	PPn BM Impor		2.50	2.63	1.45	5.34	
	PPh Pasal 22 Impor		32.01	32.39	28.32	1.20	
	Total PDRI lainnya		136.39	132.31	27.06	-2.99	
	Total Bea Cukai dan Pajak		229.28	237.47	22.52	3.57	

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga tanggal 31 Juli 2019 telah mencapai **Rp105,16 triliun**. Kinerja tersebut tumbuh sebesar 13,21 persen (*yoy*) bila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu, dan merupakan 50,36 persen dari target yang diamanatkan pada APBN tahun 2019. Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga bulan Juli 2019, merupakan yang tertinggi

sepanjang 3 tahun terakhir. Kinerja positif tersebut didorong oleh pertumbuhan signifikan komponen penerimaan cukai, dan efektifitas pelaksanaan program Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT), dalam menciptakan suasana kondusif dunia usaha. Realisasi penerimaan Bea Masuk (BM) per tanggal 31 Juli 2019, telah mencapai Rp20,69 triliun. Capaian



penerimaan tersebut merupakan 53,18 persen dari target penerimaan BM pada APBN 2019. Persentase terhadap target pada penerimaan BM, merupakan yang tertinggi dibandingkan komponen penerimaan yang lain.

Kinerja penerimaan BM dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, seperti volume perdagangan dunia. Keberlanjutan program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang meningkatkan kepatuhan pengguna jasa, turut mendorong penerimaan BM.

Realisasi penerimaan cukai hingga akhir Juli 2019, adalah sebesar Rp82,62 triliun. Realisasi penerimaan tersebut tumbuh sebesar 22,30 persen (*yoy*),

jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang sebesar 14,22 persen (*yoy*). Penerimaan cukai dikontribusikan oleh penerimaan Barang Kena Cukai (BKC) yaitu Hasil Tembakau (HT) sebesar Rp79,15 triliun, Minuman Mengandung Etil alkohol (MMEA) sebesar Rp3,36 triliun, dan Etil Alkohol (EA) sebesar Rp0,07 triliun.

Penerimaan cukai dipengaruhi oleh kinerja penerimaan cukai HT yang tumbuh sebesar 22,50 persen (*yoy*). Pertumbuhan signifikan penerimaan cukai HT konsisten sejak awal tahun, sebagai efek penerapan kebijakan relaksasi pelunasan pita cukai. Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) yang terus diperkuat dalam rangka memerangi peredaran BKC ilegal, turut mendorong kinerja penerimaan.

Realisasi penerimaan Bea Keluar (BK) sampai dengan akhir Juli 2019, berhasil mencapai Rp1,85 triliun. Capaian realisasi tersebut, merupakan 41,83 persen dari target penerimaan BK pada APBN 2019 yang sebesar Rp4,42 triliun. Kinerja penerimaan BK ditopang oleh ekspor komoditas mineral (tambang), terutama konsentrat tembaga.

Pusat Logistik Berikat Masih Menjadi Andalan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil

Pusat Logistik Berikat (PLB) merupakan kebijakan sinergis pemerintah dalam mengoptimalkan logistik nasional, dengan mendekatkan bahan baku kepada para pelaku usaha. PLB dikatakan kebijakan sinergis karena Bea Cukai berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan tidak adanya pelanggaran. Kebijakan PLB merupakan salah satu upaya mendorong laju perekonomian Indonesia dengan menciptakan efisiensi biaya logistik.

PLB diyakini memberikan manfaat, baik bagi industri besar maupun Industri Kecil dan Menengah (IKM), yang sebelumnya harus menggunakan impor borongan untuk mendapatkan bahan baku. Hal ini terungkap saat rapat pleno dalam rangka menanggapi pemberitaan mengenai dugaan penyelundupan melalui PLB yang diselenggarakan antara Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian dengan

asosiasi di antaranya Asosiasi Produsen *Synthetic Fibre* Indonesia (APSyFI), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI), Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) serta perusahaan yang bergerak di industri tekstil dan produk tekstil.

APIKMI mengonfirmasi bahwa PLB bermanfaat bagi IKM dalam penyediaan bahan baku sesuai kebutuhan dengan waktu pengiriman yang singkat. APIKMI juga berharap tidak ada perubahan kebijakan PLB. Sebagai catatan, saat ini impor tekstil melalui PLB yang dilakukan perusahaan produsen ataupun IKM sebesar 2,7 persen dari total impor tekstil nasional. Forum tersebut juga menyepakati bahwa kebijakan PLB dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/2017 yang mengatur impor tekstil melalui PLB telah sesuai dengan kebutuhan pelaku industri.



Terkait alokasi kuota volume impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, baik untuk perusahaan produsen pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan perusahaan dagang pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), akan dikuatkan melalui penetapan kuota tahunan sesuai dengan hasil analisis *supply demand*. Perihal dugaan bahan baku tekstil di pasaran yang berasal dari pemegang kuota, akan diverifikasi oleh Kementerian Perdagangan secara sinergis dengan Kementerian/ Lembaga terkait, termasuk Bea Cukai.

PLB menurut KADIN telah memudahkan proses produksi suatu industri dengan mendekatkan penyediaan bahan baku. Sebelum ada PLB di Indonesia, industri tekstil

harus membeli kapas asal Malaysia dan membutuhkan waktu 10 hari. Dengan PLB, pelaku usaha tidak harus membeli di luar negeri, bahkan harus dalam volume besar. Alhasil, pelaku usaha cukup membeli stok bahan baku untuk 1 minggu, yang sebelumnya harus untuk stok 1 bulan.

API menyatakan bahwa PLB membawa perubahan dan terobosan bagi perdagangan, serta *dwelling time*, bahkan sudah menunjukkan perbedaan. Namun demikian, aturan Peraturan Menteri Perdagangan yang terkait, masih perlu disempurnakan karena semangatnya adalah bagaimana melindungi pasar dalam negeri, dan menggalakkan ekspor secara intensif oleh industri *garment* baik industri besar maupun kecil.

Selain itu kuota impor juga perlu mendapat perhatian, sehingga importir produsen maupun importir umum dapat terkontrol dengan baik.

APIKMI menyatakan bahwa persoalan yang paling krusial bagi IKM konveksi adalah ketersediaan bahan baku. IKM harus membeli bahan baku secara borongan di Tanah Abang, sebelum ada PLB. Namun kini, IKM cukup menyampaikan kebutuhannya kepada importir umum melalui APIKMI, untuk kemudian diimpor melalui PLB. Setelah itu, IKM dapat memilih sendiri kebutuhannya dan membelinya dalam jumlah kecil.

APIKMI telah melakukan survei terhadap para pelaku IKM di Jawa Barat terkait efek bagi kelancaran produksi sebelum dan setelah adanya PLB. Terdapat beberapa parameter survei di antaranya pembelanjaan bahan baku, di mana terjadi penurunan biaya bahan baku rata-rata sebesar 11 persen

dari Rp15.500 menjadi Rp13.750.

Parameter kedua yaitu ketersediaan bahan baku, yang relatif tercukupi jika dibandingkan sebelum adanya PLB.

Parameter ketiga yaitu penambahan tenaga kerja. Ketersediaan bahan baku mengakibatkan terbukanya unit produksi baru, yang selanjutnya menambah lapangan kerja. Parameter terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi, berupa terciptanya kegiatan ekonomi di sekitar PLB berupa usaha konveksi kecil, indekos, warung makan, dan lain-lain.

Terdapat tiga unsur penting dalam PLB yaitu *technology, trust, and verified*. Pendirian suatu PLB harus melalui proses yang transparan dan tidak ada biaya. Penyelenggara PLB harus lulus uji kepabeanaan, serta dalam operasionalnya diwajibkan memasang CCTV, menyelenggarakan IT *Inventory* yang *online* dengan Bea Cukai, dan dapat diaudit setiap saat oleh Bea Cukai.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP
s.d. 31 Juli 2019
(dalam miliar
Rupiah)

	2019 APBN	Realisasi		
		31 Juli 2019	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,86	241.272,9	63,78	14,21
A. Penerimaan SDA	190.754,77	87.253,5	45,74	(5,51)
1. Migas	159.778,31	68.216,7	42,69	(6,11)
a. Minyak Bumi	118.606,71	68.216,7	57,52	(6,11)
b. Gas Alam	41.171,60	0,0	0,00	835,13
2. Non Migas	30.976,46	19.036,8	61,46	(3,29)
a. Pertambangan Minerba	24.960,72	15.103,8	60,51	(8,15)
b. Kehutanan	4.511,54	2.611,7	57,89	13,67
c. Perikanan	625,81	285,2	45,57	1,72
d. Pend. Per. Panas Bumi	878,38	1.036,0	117,94	56,64
B. Pendapatan dari KND	45.589,30	69.874,8	153,27	83,22
C. PNBP Lainnya	94.069,33	59.759,5	63,53	8,44
D. Pendapatan BLU	47.884,45	24.385,1	50,92	(5,01)

Sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp241,27 triliun atau 63,78 persen dari APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,21 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018. Kenaikan ini antara lain disebabkan kenaikan signifikan PNBP Kekayaan Negara

Dipisahkan (KND) sebesar 83,22 persen dari periode yang sama pada tahun 2018.

Kinerja Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) masih terpengaruh oleh kecenderungan penurunan harga-harga komoditas, yang dapat dilihat dari penurunan realisasi Penerimaan SDA dalam periode Januari-Juli 2019 sebesar 5,51 persen jika dibandingkan

periode yang sama di tahun 2018. Realisasi Penerimaan SDA mencapai Rp87,25 triliun atau 45,74 persen dari target APBN tahun 2019, yang terdiri dari Penerimaan SDA Migas dan SDA Nonmigas.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp68,22 triliun atau 42,69 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 6,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp72,66 triliun. Penurunan penerimaan SDA Migas tersebut antara lain disebabkan karena lebih rendahnya realisasi rata-rata ICP periode Januari-Juli 2019 sebesar USD62,88 per barel, dibandingkan dengan realisasi rata-rata ICP periode Januari-Juli 2018 sebesar USD67,14 per barel.

Penurunan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) pada periode Januari-Juli 2019 sebesar USD85,56 per ton dari rata-rata HBA periode Januari-Juli 2018 sebesar USD97,66 per ton berdampak kepada Penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), sehingga menyumbang penurunan realisasi penerimaan SDA Nonmigas.

Pada periode Januari-Juli 2019, realisasi Penerimaan SDA Nonmigas mencapai Rp19,04 triliun atau 61,46 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 3,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yaitu sebesar Rp19,68 triliun.

Realisasi PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan telah mencapai sebesar Rp69,87 triliun, di mana nilai tersebut telah melebihi target dalam APBN tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp45,70 triliun atau mencapai 153,27 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi penerimaan dari KND yang meningkat secara signifikan disebabkan adanya Setoran Sisa Surplus Bank Indonesia pada bulan Mei 2019 sebesar Rp30,00 triliun dan setoran dividen yang terealisasi sampai dengan bulan Juli 2019 yang mencapai Rp39,87 triliun. Jumlah setoran dividen dalam periode Januari-Juli 2019 tersebut mengalami kenaikan 4,47 persen dibanding realisasi periode yang sama di tahun 2018.

Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp59,76 triliun atau 63,53 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,44 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang mencapai Rp55,11 triliun. Sementara itu, sampai dengan 31 Juli 2019, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) terealisasi sebesar Rp24,39 triliun atau mencapai 50,92 persen dari target APBN tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 5,01 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp25,67 triliun (59,3 persen dari target APBN 2018).

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 31 Juli 2019 ditopang dengan meningkatnya penyerapan belanja K/L.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juli tahun 2019 sebesar Rp1.236,5 triliun (50,2 persen dari pagu APBN 2019), meningkat 7,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui perbaikan pola penyerapan belanja. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp761,5 triliun (46,6 persen dari pagu APBN 2019) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp475,1

triliun (57,5 persen dari pagu APBN 2019). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai 75,1 triliun (73,6 persen dari pagu) atau meningkat sebesar 4,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih tingginya realisasi belanja tersebut dapat mencerminkan komitmen Pemerintah untuk

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d Juli 2019 (Yang dirinci: Belanja K/L menurut jenis dan Belanja Non K/L)

Belanja Pemerintah Pusat	2019	Realisasi		
	APBN	s.d. 31 Juli 2019	% thd APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	855,45	419,88	49,08	11,70
Belanja Pegawai	224,41	150,11	66,89	13,13
Belanja Barang	344,64	146,31	42,45	10,13
Belanja Modal	189,34	48,38	25,55	(10,62)
Bantuan Sosial	97,06	75,08	77,36	33,53
Belanja Non K/L	778,89	341,59	43,86	6,37
al. Pembayaran Bunga Utang	275,89	158,63	57,50	8,32
Subsidi	224,32	92,20	41,10	1,04
Jumlah	1.634,34	761,47	46,59	9,24

senantiasa menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dalam mencukupi kebutuhannya. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 mencapai Rp92,2 triliun atau 41,1 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi subsidi energi Rp68,1 triliun dan subsidi non energi Rp24,1 triliun. Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juli 2019 lebih tinggi Rp0,9 triliun atau naik 3,8 persen dibandingkan realisasi belanja subsidi pada periode yang sama tahun 2018. Lebih tingginya realisasi subsidi dimaksud terutama dikarenakan peningkatan realisasi subsidi nonenergi sebesar Rp3,8 triliun atau 19,0 persen, terutama karena peningkatan realisasi subsidi pajak dan Public Service Obligations (PSO) PT. Pelni sebagai dampak perbaikan proses administrasi untuk pencairan subsidi. Sementara itu, realisasi subsidi

energi pada akhir Juli 2019 lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi BPP sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai Rp761,5 triliun atau 46,6 persen dari pagu APBN tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja realisasi BPP sampai dengan 31 Juli 2019 mengalami peningkatan sebesar 9,2 persen dibandingkan dengan kinerja penyerapan BPP tahun sebelumnya sebesar 47,9 persen dari pagu APBN tahun 2018. Kinerja penyerapan BPP tersebut, ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja K/L dari 44,4 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 49,1 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kinerja

realisasi belanja bantuan sosial. Sementara itu, kinerja realisasi belanja Non K/L mengalami penurunan dari 52,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2018 menjadi 43,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2019 yang terutama disebabkan pada semester I tahun 2018 terdapat pelunasan kurang bayar subsidi BBM dan LPG.

Secara nominal, realisasi BPP K/L sampai dengan 31 Juli 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 11,70 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2018. Pertumbuhan realisasi BPP K/L terutama berasal dari realisasi belanja bantuan sosial yang tumbuh sebesar 33,53 persen, belanja pegawai sebesar 13,13 persen, serta belanja barang sebesar 10,13 persen. Pertumbuhan ketiga jenis belanja tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan konsumsi, baik itu konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah yang lebih baik

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Kinerja realisasi belanja bantuan sosial sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai 73,6 persen terhadap pagu APBN tahun 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 69,2 persen dari pagu APBN tahun 2018. Meningkatnya realisasi belanja bantuan sosial tersebut menunjukkan bentuk keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sejak awal tahun, yang antara lain direalisasikan melalui: (i) pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah mencapai 82,4 persen dari pagu, (ii) penyaluran untuk 12 bulan bantuan premi bagi PBI JKN tahun 2019 yang mencapai 99,3 persen dari alokasinya, (iii) realisasi bantuan pangan yang mencapai 52,3 persen dari pagu, dan (iv) realisasi Bansos lainnya (antara lain

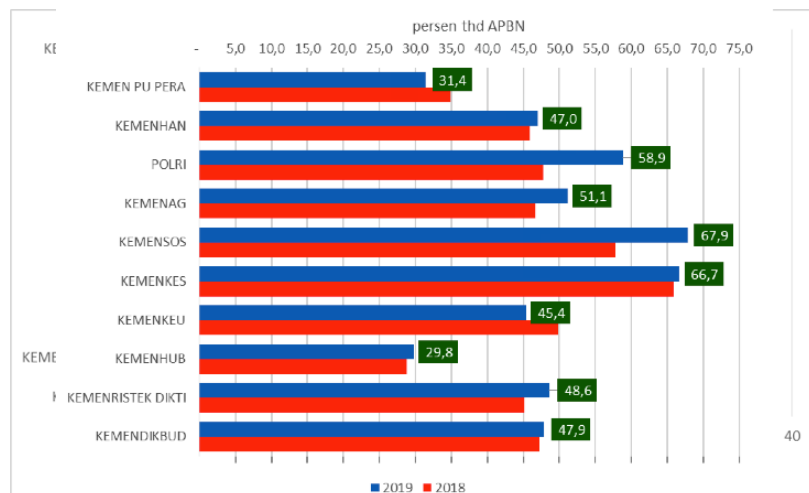
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bidikmisi).

Sementara itu, realisasi belanja pegawai (khususnya belanja pegawai K/L) juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 66 persen dari pagu APBN 2018 meningkat menjadi 66,9 persen dari pagu APBN 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L seiring dengan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi

pada masing-masing K/L serta telah dicairkannya anggaran THR bagi aparatur negara pada akhir bulan Mei tahun 2019, dan gaji ke-13 pada bulan Juli.

Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Juli 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 39,1 persen terhadap APBN tahun 2018 menjadi 42,4 persen terhadap APBN tahun 2019. Proporsi realisasi belanja barang yang terbesar adalah untuk program bantuan stimulan perumahan

Grafik Perkembangan Penyerapan Belanja 10 K/L terbesar (% realisasi)



Tabel Nilai belanja yang sudah dikontrakan dan dilaporkan sampai dengan akhir Juli 2019

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN	Nilai Kontrak
1	KEMEN PU PERA	110,73	66,52
2	KEMENHAN	108,36	35,15
3	KEMENHUB	86,19	22,18
4	POLRI	41,55	20,83
5	KEMENKUMHAM	41,26	4,55
6	KEMENKEU	58,75	3,99
7	KPU	21,69	4,06
8	KEMENRISTEK DIKTI	13,31	3,77
9	BSSN	45,16	2,43
10	KEMENKES	9,08	2,36
10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar		536,07	165,84
KL Lainnya		319,38	31,69
Total KL		855,45	197,53

swadaya, yaitu berupa peningkatan kualitas atau pembangunan baru bagi rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya, proporsi terbesar berikutnya yaitu untuk penyediaan dana bantuan operasional dan bantuan pendanaan untuk perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ristekdikti.

Realisasi belanja modal sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai 25,6 persen dari pagu APBN 2019, atau sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 26,6 persen dari pagu APBN tahun 2018. Sedikit lebih rendahnya realisasi belanja modal tersebut antara lain dikarenakan proses adaptasi atas perubahan proses pengadaan barang dan jasa, kegagalan proses pelelangan

beberapa kegiatan, dan pembebasan lahan yang masih belum selesai. Adapun proporsi realisasi belanja modal terbesar antara lain terjadi pada (1) belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang dipergunakan untuk preservasi rekonstruksi, rehabilitasi dan pembangunan jalan dan jembatan,

termasuk prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, dan (2) belanja modal peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Kementerian Agama, dan Basarnas.

Tabel beberapa output strategis K/L sampai dengan bulan Juli 2019

	INDIKATOR	TARGET	REAL S.D. JULI
KEMENPUPERA	Pembangunan jalan baru (km)	405,6	90,17
	Pembangunan jalan tol (km)	8,26	5,03
	Pembangunan jembatan (m)	17.283,29	2.869,03
KEMENHUB	Pembangunan bandara	4	0
	Pembangunan rel KA (km 'sp)	540,6	134,8
BNN	Deteksi dini penyalahgunaan Narkoba di Instansi Pemerintah		
	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (berkas)	627	419
	Berkas Perkara TPPU Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika (berkas)	47	12
KEMDIKBUD	Penyaluran KIP (siswa)	17,9 juta	11,9 juta
	Penyaluran KIP (siswa)	2,2 juta	0,7 juta
KEMENAG	Penyaluran BOS (siswa)	8,9 juta	5,8 juta
	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	32 ribu	15,3 ribu
KEMRISTEKDIKTI	Penyaluran Bidik Misi (mahasiswa)	430.961	302.898
KEMENKES	Penyaluran JKN-KIS (jiwa)	96,8 juta	96,7 juta
	Penyaluran PKH (KPM)	10,0 juta	9,0 juta
KEMENSOS	Bantuan pangan	15,6 juta	14,9 juta
	Peningkatan/Pengadaan/Penggantian Alutsista, a.l:		
KEMENHAN	Alpung, Kri, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	29	12
	MKK (unit)	235.717	7.856
POLRI	Progress Pengadaan		
	Almatsus (unit)	140.512	31.805
	Rumdin Personil (unit/KK)	92.813	14.137

Tabel realisasi belanja non K/L sampai dengan Juli 2019

Belanja NonK/L	2019			% Growth APBN
	APBN	s.d Juli 2019	% thd APBN	
1. Pembayaran Bunga Utang	275,89	158,63	57,50	8,32
2. Subsidi	224,32	92,20	41,10	1,04
JUMLAH	778,89	341,59	43,86	9,24

A. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2019

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai Rp419,88 triliun atau 49,08 persen dari pagu APBN 2019. Realisasi belanja K/L tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja K/L pada periode yang sama tahun 2018 sebesar 44,4 persen. Realisasi belanja K/L tersebut didominasi oleh 15 K/L terbesar (84,28 persen dari total belanja K/L), utamanya Kementerian Sosial yang telah merealisasikan sebagian Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L antara lain kelanjutan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui lelang

dini, beberapa kegiatan pendukung pelaksanaan Pemilu 2019, dan penyaluran belanja bantuan sosial seperti PKH, bantuan pangan, dan bantuan premi PBI JKN.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan, nilai kontrak yang telah dilakukan K/L sampai dengan bulan Juli 2019 mencapai Rp197,53 triliun. Nilai dari jumlah kontrak tersebut sebagian besar dilakukan oleh 4 K/L, yaitu Kemen PUPR, Kemenhan, POLRI, dan Kemenhub.

Sementara itu, beberapa output strategis K/L sampai dengan bulan Juni 2019 menunjukkan capaian yang positif diantaranya penyaluran PKH dan bantuan pangan. Selain

itu, pembangunan infrastruktur juga terus memperlihatkan adanya progres seperti pembangunan jalan baru, pembangunan jalan tol, dan pembangunan jembatan, dan pembangunan rel kereta api.

B. REALISASI BELANJA NONK/L TAHUN 2019

Realisasi belanja non K/L sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai Rp341,6 triliun lebih tinggi secara nominal dibanding dengan tahun 2018 yang mencapai Rp321,1 triliun. Namun demikian, secara persentase belanja non K/L mengalami penurunan dari 52,9 persen terhadap APBN 2018 menjadi 43,9 persen terhadap APBN 2019. Penurunan realisasi belanja non K/L terutama disebabkan menurunnya realisasi pembayaran bunga utang dan belanja subsidi.

Realisasi pembayaran bunga utang sampai dengan 30 Juli 2019 sebesar 57,50 persen terhadap APBN 2019, atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 61,38 persen terhadap APBN 2018. Hal tersebut dikarenakan kondisi yield SBN yang cenderung menurun di awal tahun 2019 dibandingkan kondisi

pada awal tahun 2018 sehingga biaya diskon cenderung lebih rendah. Selain itu, secara umum variasi komposisi penerbitan dan perbedaan jadwal pembayaran kupon SBN seri benchmark juga menyebabkan pembayaran bunga utang bersifat dinamis

Belanja subsidi diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat serta membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas barang subsidi dengan harga terjangkau, antara lain LPG tabung 3 Kg, BBM jenis minyak solar dan minyak tanah, tarif listrik, dan pupuk. Namun demikian, Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran. Dalam APBN 2019, belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp224,3 triliun. Sementara itu, realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Juli 2019 mencapai Rp92,2 triliun atau 41,1 persen dari pagu APBN tahun 2019. Realisasi subsidi non energi hingga akhir Juli 2019 terutama dipengaruhi oleh realisasi subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, dan subsidi PPh Ditanggung Pemerintah.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Secara keseluruhan, komponen TKDD tumbuh positif pada periode Januari s.d. Juli 2019

Realisasi penyaluran TKDD hingga 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp475,07 triliun atau 57,46 persen dari pagu alokasi. Tumbuh 5,89 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Hal ini disebabkan hampir seluruh komponen TKDD mencetak pertumbuhan positif dibanding tahun lalu.

DANA PERIMBANGAN

Per 31 Juli 2019, Dana Bagi Hasil (DBH) telah disalurkan sebesar Rp51,46 triliun atau 48,39 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut lebih tinggi 4,76 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2018. Perbaikan capaian ini disebabkan oleh adanya penyaluran sebagian Kurang Bayar (KB) DBH di Juli 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.07/2019 sebesar Rp2,72 triliun.

Realisasi penyaluran Dana Alokasi

Umum (DAU) sampai dengan akhir Juli 2019 telah mencapai Rp277,47 triliun atau 66,40 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut meningkat 3,79 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2018. Dari total realisasi DAU tersebut, Rp1,46 triliun diantaranya merupakan realisasi penyaluran DAU Tambahan untuk bantuan pendanaan Kelurahan (pagu Rp3 triliun) kepada 403 Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang menunjang peningkatan realisasi DAU di atas antara lain: (i) penyelesaian kewajiban tunggakan iuran jaminan kesehatan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) oleh 11 Pemerintah Daerah sebesar Rp30,17 miliar; (ii) penyelesaian kewajiban Daerah Otonom Baru (DOB) pada 1 Pemerintah Daerah sebesar Rp2,00 miliar; dan (iii) penundaan penyaluran DAU reguler terhadap 63 Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan

laporan Informasi Keuangan Daerah sebesar Rp574,27 miliar.

DAU Tambahan telah memasuki periode penyaluran Tahap II. Per 31 Juli 2019, sudah ada pemerintah daerah yang menyampaikan persyaratan penyaluran Tahap II dan saat ini sedang dalam proses rekomendasi penyaluran. Berbagai upaya terus dilakukan demi mendorong Pemerintah Daerah segera melaksanakan kegiatan yang didanai dari DAU Tambahan agar penyaluran DAU Tambahan Tahap II tidak mengalami kendala.

Beralih ke Dana Transfer Khusus (DTK), yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik. Upaya meningkatkan *governance* DAK Fisik dilakukan dengan menerbitkan PMK Nomor 121/PMK.07/2018. Salah satu yang diatur dalam PMK ini adalah terkait peran Inspektorat Daerah dalam mereview dokumen laporan realisasi penyerapan dan capaian output pelaksanaan DAK Fisik sebagai salah satu syarat penyaluran DAK Fisik.

Realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp16,02 triliun atau 23,11 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 16,88 persen dibanding realisasi periode yang sama di tahun lalu. Hingga batas akhir penyampaian syarat penyaluran tahap I, tanggal 22 Juli 2019, daftar kontrak kegiatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah mencapai Rp63,2 triliun atau 91,17% dari pagu alokasi. Besaran nilai kontrak tersebut

menggambarkan *outlook* penyaluran DAK Fisik karena penyaluran DAK Fisik didasarkan besaran kontrak kegiatan. Meskipun demikian, khusus untuk tahun 2019 nilai kontrak tersebut masih dapat meningkat karena untuk daerah terdampak gempa terdapat kebijakan perpanjangan penyampaian dokumen syarat penyaluran tahap I sesuai dengan PMK Nomor 145/PMK.07/2018.

Hingga akhir Juli 2019, penyaluran DAK Nonfisik telah terealisasi sebesar Rp75,66 triliun atau 57,74 persen dari pagu alokasi. Penyaluran DAK Nonfisik meningkat 5,57 persen bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan daerah yang semakin meningkat dalam menyampaikan laporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG).

DANA INSENTIF DAERAH (DID)

Per 31 Juli 2019, DID telah disalurkan sebanyak Rp5,32 triliun atau 53,22 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut mengalami peningkatan 20,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini didukung oleh pemahaman Pemerintah Daerah yang semakin baik terhadap peraturan terkait DID.

Dari total 336 Pemerintah Daerah yang telah menerima penyaluran DID Tahap I, 13 diantaranya adalah Pemerintah

Daerah penerima DID yang terdampak bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk penyaluran DID Tahap II, sudah ada 8 Pemerintah Daerah yang telah menerima penyaluran dengan total nominal sebesar Rp146,61 miliar. Adapun penyaluran DID tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50 persen dengan persyaratan berupa laporan realisasi penyerapan dana Tahap I yang menunjukkan penyerapan minimal 70 persen, yang diserahkan paling lambat bulan Agustus.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sampai dengan 31 Juli 2019 adalah sebesar Rp6,29 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Angka ini lebih tinggi 4,59 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada

periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran Dana Keistimewaan Provinsi D.I. Yogyakarta juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 20 persen jika dibanding tahun lalu. Adapun nominal yang telah disalurkan adalah sebesar Rp0,96 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi.

DANA DESA

Hingga 31 Juli 2019, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD telah mencapai Rp41,88 triliun atau 59,83 persen dari pagu alokasi. Tumbuh 16,78 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2018. Capaian tersebut tak lepas dari koordinasi dan sosialisasi kepada Pemerintah Desa yang telah dilakukan selama ini.

Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2018 dan 2019
Tanggal : 1 Januari s.d. 31 Juli 2019

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2018			2019		
	Alokasi	Realisasi	% thd APBNP	Alokasi	Realisasi	% thd APBN
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766.162,58	385.573,61	50,33	826.772,53	475.071,44	57,46
Transfer ke Daerah	706.162,58	349.712,94	49,52	756.772,53	433.191,70	57,24
A. Dana Perimbangan	676.602,99	338.645,06	50,05	724.592,59	420.615,75	58,05
1. Dana Transfer Umum	490.714,92	268.208,52	54,66	524.223,75	328.931,07	62,75
a. Dana Bagi Hasil	89.225,34	34.252,74	38,39	106.350,16	51.461,64	48,39
b. Dana Alokasi Umum	401.489,58	233.955,78	58,27	417.873,58	277.469,42	66,40
2. Dana Transfer Khusus	185.888,07	70.436,54	37,89	200.368,84	91.684,68	45,76
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	62.436,26	7.761,87	12,43	69.326,70	16.023,40	23,11
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123.451,81	62.674,67	50,77	131.042,14	75.661,29	57,74
B. Dana Insentif Daerah	8.500,00	4.250,00	50,00	10.000,00	5.321,97	53,22
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	21.059,58	6.817,87	32,37	22.179,94	7.253,98	32,71
1. Dana Otsus	20.059,58	6.017,87	30,00	20.979,94	6.293,98	30,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.029,79	2.408,94	30,00	8.357,47	2.507,24	30,00
b. Provinsi Aceh	8.029,79	2.408,94	30,00	8.357,47	2.507,24	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.000,00	1.200,00	30,00	4.265,00	1.297,50	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.000,00	800,00	80,00	1.200,00	960,00	80,00
Dana Desa	60.000,00	35.860,67	59,77	70.000,00	41.879,74	59,83

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Foto:
DJPPR

PEMBIAYAAN UTANG

Mendukung keuangan yang inklusif, dengan rasio utang terjaga pada 29,51% per PDB di tengah meningkatnya risiko global

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp234,13 triliun atau 65,2 persen target APBN yang terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp241,19 triliun atau 62,0 persen target APBN dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp7,06 triliun atau 23,8 persen target APBN. Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang lebih besar dari pada penarikan Pinjaman Luar Negeri, namun untuk Pinjaman Dalam Negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok. Hingga akhir Juli 2019 Pemerintah telah membayarkan cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,58 triliun atau 39,3 persen dari target APBN sementara cicilan pokok Pinjaman

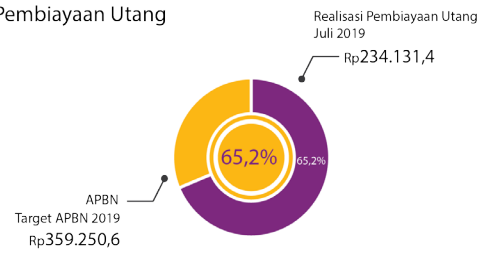
Luar Negeri telah dibayarkan sebesar Rp47,04 triliun atau 52 persen target APBN. Sementara itu, Penarikan Pinjaman Dalam Negeri mencapai Rp0,75 triliun atau 38,5 persen target APBN dan penarikan Pinjaman Luar Negeri mencapai Rp39,81 triliun atau 66,0 persen target APBN.

Sejak beberapa tahun terakhir, infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia (Human Capital) telah menjadi fokus utama Pemerintah. Ketertinggalan infrastruktur serta daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia merupakan problem berkelanjutan yang harus segera diputus mata rantainya jika Indonesia ingin bersaing di tingkat global. Untuk mendukung fokus pembangunan tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif

INFOGRAFIS Pembiayaan Utang

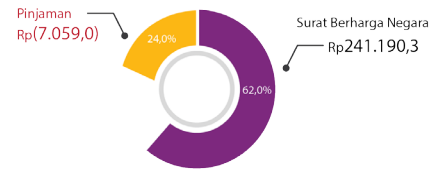
Sejak beberapa tahun terakhir, infrastruktur dan pembangunan Sumber Daya Manusia (Human Capital) telah menjadi fokus utama Pemerintah. Keteringgalan infrastruktur serta daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia merupakan problem berkelanjutan yang harus segera diputus mata rantainya jika Indonesia ingin bersaing di tingkat global.

Pembiayaan Utang



(dalam miliar rupiah)

Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

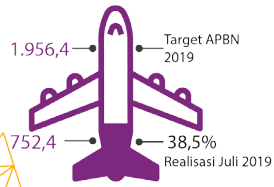


(dalam miliar rupiah)

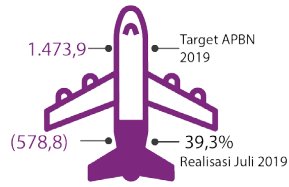
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)



Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



(dalam miliar rupiah)

Pinjaman Luar Negeri (Neto)



Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

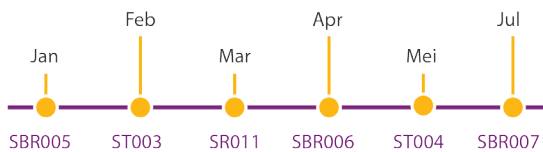


Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



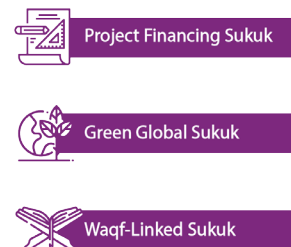
(dalam miliar rupiah)

Penerbitan SBN Ritel Online Selama Tahun 2019



Berulang kali mencatatkan keberhasilannya dengan hasil penjualan melebihi target indikatif serta dapat mencapai tingkat keritelan yang semakin baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi semakin meningkat, yang tak lepas dari upaya Pemerintah dalam melakukan financial inclusion dan financial literacy.

Terobosan Jenis Penerbitan SBN Berbasis Proyek



Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif yang diwujudkan dengan pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional.

(dalam miliar Rupiah)

Pembiayaan Utang

	2019		
	APBN	s.d. 31 Juli	% APBN
Pembiayaan Utang	359.250,6	234.131,4	65,2%
1. Surat Berharga Negara (Neto)	388.957,9	241.190,3	62,0%
2. Pinjaman (Neto)	(29.707,3)	(7.059,0)	23,8%
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	482,4	173,6	36,0%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	1.956,4	752,4	38,5%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1.473,9)	(578,8)	39,3%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(30.189,7)	(7.232,6)	24,0%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	60.280,5	39.810,7	66,0%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(90.470,2)	(47.043,3)	52,0%

dengan menggunakan APBN sebagai buffer yang memungkinkan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan negara. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan belanja di sektor prioritas yang mendesak, agar tidak menimbulkan biaya yang lebih besar lagi di masa depan (opportunity loss). Untuk itu Pemerintah menggunakan pembiayaan sebagai alat, dengan tetap memperhatikan prinsip APBN yang sehat, berkeadilan dan mandiri.

Pemerintah telah menetapkan strategi jangka menengah dan tahunan untuk mendukung pengadaan Pembiayaan dengan biaya minimal dan risiko

yang terkendali, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri dan menggunakan pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap. Pemerintah semakin membatasi pinjaman luar negeri untuk menghindari fluktuasi mata uang yang nantinya akan membebani anggaran serta semakin berdayanya dukungan domestik dalam pembangunan dan pembiayaan defisit.

Selain itu, Pemerintah juga bertekad untuk terus meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan SBN ritel secara dalam jaringan (online). Sampai dengan akhir Juli 2019,

Pemerintah telah menerbitkan SBN ritel secara online sebanyak 6 kali, yang terdiri dari: SBR005; ST003; SR011; SBR006; ST004; dan SBR007. Penerbitan tersebut dilakukan secara

bergantian setiap bulan kecuali bulan Juni yang bertepatan dengan momen Hari Raya Idul Fitri, dan berulang kali mencatatkan keberhasilannya dengan hasil penjualan melebihi

Posisi Utang Hingga Akhir Juli 2019

(dalam Triliun Rupiah)

	Juli - 18		Juli - 19	
	Nominal	Komposisi	Nominal	Komposisi
Total Utang Pemerintah Pusat	4257,34	100,00%	4.603,62	100,00%
a. Pinjaman	789,82	18,55%	782,72	17,00%
1. Pinjaman Luar Negeri	784,03	18,42%	775,30	16,84%
Bilateral	323,79	7,61%	308,63	6,70%
Multilateral	415,52	9,76%	428,69	9,31%
Komersial	43,32	1,02%	37,99	0,82%
Suppliers	1,40	0,03%	-	0,00%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,79	0,14%	7,42	0,16%
b. Surat Berharga Negara	3.467,52	81,45%	3.820,90	83,00%
1. Denominasi Rupiah	2442,82	57,38%	2.788,30	60,57%
Surat Utang Negara	2.046,66	48,07%	2.310,62	50,19%
Surat Berharga Syariah Negara	396,16	9,31%	477,68	10,38%
2. Denominasi Valas	1024,71	24,07%	1.032,60	22,43%
Surat Utang Negara	801,31	18,82%	819,41	17,80%
Surat Berharga Syariah Negara	223,40	5,25%	213,20	4,63%
Rasio Utang thd PDB			29,51%	

target indikatif serta dapat mencapai tingkat keritelan yang semakin baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terutama generasi milenial untuk berinvestasi semakin meningkat, yang tak lepas dari upaya Pemerintah dalam melakukan financial inclusion dan financial literacy.

Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif yang diwujudkan dengan pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan SBN berbasis proyek yang mendukung program pembangunan nasional. Dari sisi pembiayaan berbasis syariah, Pemerintah juga terus mengembangkan berbagai terobosan seperti penerbitan Project Financing Sukuk dan Green Global Sukuk.

Selain strategi tersebut, Pemerintah senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian (pruden), efisien, dan terukur (akuntabel) dalam mengelola utang. Pengelolaan utang Pemerintah juga telah diatur di dalam UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan UU APBN yang ditetapkan setiap tahunnya. UU Keuangan Negara telah mengatur batasan defisit APBN sebesar 3 persen dari rasio PDB serta batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen terhadap PDB, sementara dalam UU APBN yang merupakan produk bersama antara Pemerintah dengan DPR, telah ditetapkan besarnya estimasi

pengadaan pembiayaan dan besaran anggaran untuk melunasi utang negara. Adanya payung hukum tersebut semakin membuktikan bahwa pengelolaan utang Pemerintah senantiasa dilakukan secara hati-hati dalam batas aman. Di sisi lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk mengembangkan alternatif pembiayaan kreatif dan inovatif di luar porsi APBN untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

APBN 2019 masih menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang memungkinkan belanja negara lebih besar dari pada pendapatan, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Pemerintah harus mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya, salah satunya dengan utang.

Posisi utang Pemerintah per akhir Juli 2019 berada di angka Rp4.603,62 triliun, dengan asumsi PDB per Kapita akhir Juli Rp15.599,01 rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,51 persen. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah sebesar Rp115 pada Juli 2019 menyebabkan penurunan nilai posisi utang akibat selisih kurs senilai Rp21,46 triliun.

Secara nominal terjadi peningkatan atas jumlah utang Pemerintah bulan Juli 2019 dibandingkan bulan sebelumnya, yang mana peningkatan tersebut lebih disebabkan adanya peningkatan utang dari SBN domestik. Berlawanan dengan SBN Domestik, nominal pinjaman serta utang SBN dalam valuta asing justru mengalami penurunan di bulan Juli 2019 jika dibandingkan dengan bulan Juni 2019. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah masih berkomitmen untuk lebih mengutamakan utang Domestik dibandingkan dengan pinjaman luar negeri sesuai yang digariskan dalam strategi pembiayaan jangka menengah.

Lebih jauh, hal tersebut juga menegaskan bahwa utang Pemerintah telah dikelola dengan aman dimana hal tersebut ditunjukkan dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 1,14 persen yang masih jauh berada di

Rasio utang per PDB mengalami **tren menurun** sejalan pengelolaan utang yang **pruden dan akuntabel**.



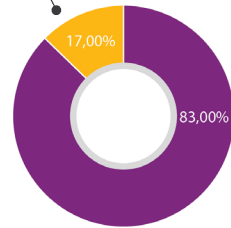
**Asumsi s/d Juli 2019

Posisi Utang Per Juli 2019
Rp4.603,62 (dalam triliun rupiah)

Pinjaman
Rp782,72

- Pinjaman Dalam Negeri
Rp7,42
- Pinjaman Luar Negeri
Rp775,30

• Bilateral	308,63
• Multilateral	428,69
• Commercial Banks	37,99
• Suppliers	-



Surat Berharga Negara
Rp3.820,90

- Domestik
Rp2.788,30
- Valas
Rp 1.032,60

• Surat Utang Negara	2.310,62
• Surat Berharga Syariah Negara	477,68

• Surat Utang Negara	819,41
• Surat Berharga Syariah Negara	213,20



Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah sebesar Rp115 pada Juli 2019 menyebabkan penurunan nilai posisi utang akibat selisih kurs senilai Rp21,46 triliun

bawah batas aman 3 persen serta realisasi rasio posisi utang sebesar 29,51 persen yang berada di bawah batas aman 60 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia secara agregat mampu menutup lebih dari 3 kali jumlah posisi utang Pemerintah. Sepanjang tahun 2019 ini rasio utang Pemerintah terhadap PDB terus

mengalami penurunan sejalan dengan pengelolaan utang yang pruden dan akuntabel dalam mendukung APBN yang semakin kredibel.

Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan pendalaman pasar domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman bervaluta asing yang dilaksanakan

salah satunya melalui penerbitan secara teratur SBN seri ritel secara bergantian sepanjang tahun 2019. Filosofi di balik penerbitan SBN ritel adalah melibatkan seluruh warga negara dalam pembangunan Indonesia serta menumbuhkan “sense of ownership” segala tingkatan masyarakat terhadap pembangunan serta pengelolaan negara.

Pada Juli 2019, Pemerintah menerbitkan SBR007 dengan masa penawaran 11 sampai dengan 25 Juli 2019. SBR007 merupakan SBN Ritel online keenam yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2019 setelah lima seri sebelumnya, yaitu SBR005; ST003; SR011; SBR006; ST004. Capaian penjualan SBR007 berhasil melebihi target indikatif sebesar Rp2triliun meskipun dengan tingkat kupon yang lebih rendah dari SBR seri sebelumnya, yaitu berada di tingkat kupon 7,50 p.a. floating with floor.

Selain itu, penerbitan kali ini berhasil mencatatkan tambahan investor baru sebanyak 9.956 investor, dan 229 investor yang kembali membeli

SBR sejak Pemerintah menerbitkan SBR secara online dengan nominal pembelian SBR007 sebesar Rp59,79 miliar. Generasi milenial pun tetap menunjukkan kontribusinya dengan mendominasi sebanyak 50,85 persen dari total investor. Capaian tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial cukup melek investasi dan memiliki kesadaran tinggi untuk turut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.

Selanjutnya, Pemerintah kembali membuka penawaran SBN Ritel Online untuk bulan Agustus 2019 dengan seri ST005 yang ditawarkan pada 8 sampai dengan 21 Agustus 2019. Meskipun tingkat imbalan kembali menurun, yaitu 7,40 persen, namun Pemerintah tetap optimis bahwa penerbitan ini akan kembali melampaui target indikatif.

Raihan Penghargaan yang diterima Kementerian Keuangan pada tahun 2019

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	Kinerja Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2018 – Kategori Unit Eselon I yang memiliki Satker Vertikal	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	Jakarta, 20 Agustus 2019

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Pajak			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	Gold Winner – The Best of E-Magazine Government	Serikat Perusahaan Pers	7 Februari 2019
2	Silver Winner – kanal media sosial Kementerian	PR Indonesia	28 Maret 2019
3	Gold Award – Public Sector	International Public Relations Association	27 September 2019

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Perbendaharaan			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	Opini WTP atas LKPP tahun 2018	Badan Pemeriksa Keuangan	28 Mei 2019
2	<i>Recognition of Excellence 2019 dari atas Ultra Micro (UMi) Digital Financing Ecosystem Program Trial</i>	OpenGov	18 Juli 2019
3	Online Monitoring SPAN (OMSPAN) meraih penghargaan inovasi pelayanan public dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019 yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Baku, Azerbaijan	PBB diserahkan oleh KemenPAN-RB	18 Juli 2019
4	Aplikasi sistem sertifikasi bendahara (Simserba) sebagai inovasi layanan DJPB, dalam Top 99 inovasi pelayanan publik	KemenPAN-RB	18 Juli 2019

Unit Eselon I: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	Gold Winner dalam ajang The 8th Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) tahun 2019	Serikat Perusahaan Pers (SPS)	8 Feb 2019
2	<i>Tiga penghargaan pada acara Indonesia Content Marketing Awards (ICMA) Tahun 2019 dalam kategori Owned Media, The best Inhouse Magazine, dan Influencer Marketing.</i>	KGMedia, Grid, dan Gridvoice	27 Mar 2019
3	Indonesia Branding Campaign of the Year 2019 dalam kategori Public Relations Campaign untuk kegiatan 'Annual Meetings World Bank Group 2018'	MarkPlus, Inc. dan Mark-Plus Insight	15 Maret 2019
4	Platinum Award Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2019. Dalam ajang ini, Kemenkeu memperoleh penghargaan untuk kategori: <ul style="list-style-type: none"> Gold Winner untuk media internal terbaik (Media Keuangan) Silver Winner untuk e-magazine Media Keuangan Silver Winner untuk website www.kemenkeu.go.id. Gold Winner untuk media sosial Kementerian Keuangan RI Gold Winner pada kategori annual repor Gold Winner untuk Program Komunikasi IMF - World Bank Group Annual Meetings 2018 	PR Indonesia	28 Maret 2019
5	Silver Award dalam ajang Australasian Annual Report (ARA) Award kategori General Award	Australasian Reporting Awards	18 April 2019
6	Anugrah Humas Indonesia Penghargaan diberikan untuk: <ul style="list-style-type: none"> Website Kementerian Keuangan RI Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif Pranata Humas Terampil - Pranata Humas Ahli	Humas Indonesia	30 Agustus 2019
7	Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instansi pemerintah yang memiliki inisiatif membangun kualitas kebijakan publik yang baik	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	6 Maret 2019

Unit Eselon I: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
8	Akreditasi A (Sangat Baik) dalam Pengelolaan Arsip	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	15 Februari 2019
9	Konsistensi Penerapan ISO 27001 sejak tahun 2012	British Standard Institution (BSI) Indonesia	12 Februari 2019

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	International Leaders Model United Nation in Bangkok	Model United Nations	2 Februari 2019
2	Policy Workshop on Reforming State-Owned Enterprises in Asia	Asian Development Bank Intitute (ADB) dan Academy of Finance of Vietnam	7 Maret 2019
3	Best Country Paper Malaysian echnical Cooperaion Programme in Malaysia	Malaysian Technical Cooeperation Programme	2 Agustus 019

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	Indonesia Deal of the Year untuk Sukuk Negara	Islamic Finance News	15 Januari 2019
2	Sovereign Deal of the Year untuk Sukuk Negara	Islamic Finance News	15 Januari 2019
3	Best Environment, Social and Governance (ESG)	Finance Asia Sukuk Negara	13 Februari 2019
4	SRI Bond, Islamic Issue, untuk Sukuk Negara	International Financing Review Asia	26 Februari 2019
5	SRI Capital Market Issue of The Year	International Financing Review Asia	26 Februari 2019
6	Green Bond Pioneer Award untuk Sukuk Negara	Climate Bond Initiative	5 Maret 2019
7	Green Bond of the Year, Sovereign untuk Sukuk Negara	Environmental Finance	2 April 2019
8	Best Sovereign Sukuk / Best Green Sukuk	The Asset Triple A (Islamic Finance Awards 2019)	9 Juni 2019
9	Most Innovative Debt Management Office (DMO) Issuer of Sovereign Sukuk	ICG - diberikan saat 2019 London Sukuk Summit di Inggris	3 Juli 2019
10	Mitra Kelembagaan Terpilih BPKH Tahun 2019	Badan Pengelola Keuangan Haji	18 Juli 2019

Unit Eselon I: Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	The Best of Government Inhouse Magazine (InMA) 2019 - Silver Winner	Serikat Perusahaan Pers	07 Februari 2019
2	Media Cetak Internal Terbaik 2019 - Gold and Bronze Winner	PR Indonesia	28 Maret 2019

Unit Eselon I: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	The Best Inhouse Magazine Awards (InMA) 2019 - Silver winner	Serikat Perusahaan Pers	07 Februari 2019
2	Majalah Edukasi Keuangan BPPK meraih penghargaan Bronze Winner pada Kompetisi Public Relation Indonesia Awards 2019	PR Indonesia	15 Januari 2019
3	Anugerah Best Corporate University Holistic Human and Digital Approach Bronze Award	Global Council of Corporate University, Sao Paulo, Brazil.	
4	Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik	2019 Lembaga Administrasi Negara (LAN)	
5	Peringkat I Pemilihan Widyaiswara Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019 melalui Junaedi Purnomo, Widyaiswara pada BDK Yogyakarta.		
6	Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik 2019: Learning Centre for the Fourth Industrial Revolution kategori Lembaga Pemerintah Pusat Terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan dan Latsar CPNS Terbaik ke-III melalui Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).		
7	Peringkat III dalam Kompetisi Inovasi Pelatihan Kepemimpinan III melalui Agung Yuniarto, Pejabat Adminstrator pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.		
8	BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menjadi salah satu LPPBJ penerima penghargaan	LKPP	

Unit Eselon I: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan			
No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tanggal Penyerahan
1	Inovasi pelayanan terbaik unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2018 (Top 5)	Model United Nations	2 Februari 2019
2	Peringkat II kategori informative PPD Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan	21 Januari 2019
3	Peringkat II kategori informative PPD Kementerian Keuangan	Menteri Keuangan	29 uli 2019

Realisasi APBN s.d. 31 Juli 2018 dan 2019

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	2018			2019		
	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN	APBN	Realisasi s.d. 31 Juli	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.894,7	994,6	52,5	2.165,1	1.052,8	48,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.893,5	991,3	52,4	2.164,7	1.052,0	48,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.618,1	780,1	48,2	1.786,4	810,7	45,4
a. Pendapatan DJP	1.424,0	687,2	48,3	1.577,6	705,6	44,7
b. Pendapatan DJBC	194,1	92,9	47,9	208,8	105,2	50,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	275,4	211,3	76,7	378,3	241,3	63,8
II. HIBAH	1,2	3,3	276,7	0,4	0,8	185,0
B. BELANJA NEGARA	2.220,7	1.145,7	51,6	2.461,1	1.236,5	50,2
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.454,5	697,0	47,9	1.634,3	761,5	46,6
1. Belanja K/L	847,4	375,9	44,4	855,4	419,9	49,1
2. Belanja Non /L	607,1	321,1	52,9	778,9	341,6	43,9
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,2	448,6	58,6	826,8	475,1	57,5
1. Transfer ke Daerah	706,2	412,8	58,5	756,8	433,2	57,2
2. Dana Desa	60,0	35,9	59,8	70,0	41,9	59,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(87,3)	(4,6)	5,3	(20,1)	(25,1)	124,7
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	(325,9)	(151,0)	46,3	(296,0)	(183,7)	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2,19)	(1,02)		(1,84)	(1,14)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)	325,9	212,3	65,1	296,0	229,7	77,6
I. PEMBIAYAAN UTANG	399,2	211,9	53,1	359,3	234,1	65,2

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

